



LAPORAN

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2024

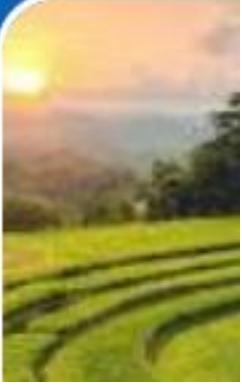


Sekertariat SDGs Provinsi NTB

+(0370) 631-581

bappeda.ntbprov.go.id

Jl. Flamboyan no.2 Mataram



ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTB tahun 2024 tidak di ukur karena belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. RAD TPB/SDGs telah habis masa berlakunya sejak tahun 2023. Sehingga dalam laporan ini hanya kan ditampilkan capian dari masing-masing indikator SDGs.

Tantangan yang cukup dinamis yang sedang dihadapi pemerintah provinsi NTB pada tahun 2024 yang masih sangat dirasakan dampaknya diberbagai sektor pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan pemulihan sektor-sektor pembangunan yang terpuruk. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan strategi dan arah kebijakan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam RPD tahun 2024-2026 yang merupakan bagian internalisasi dan harmoninasi percepatan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi NTB. Upaya percepatan dan pencapaian target indikator melalui intervensi program/kegiatan yang di fokuskan untuk mendukung program prioritas dan program unggulan. Keberhasilan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen bersama dengan memastikan sinergitas program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.



KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tanggal waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan SDGs Provinsi NTB tahun 2023 yang disusun menggambarkan progres capaian 17 tujuan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB diharapkan dapat mendorong semua Pemerintah Daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya. Adapun langkah startegis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB guna memastikan terlaksanakanya TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 dan telah di revisi menjadi Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2021 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun substansi muatan yang diintegrasikan dalam dokumen dimaksud diantaranya, sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Guna memastikan terwujudnya capaian tujuan TPB/SDGs, maka diharapkan peran masing-masing stakeholder yang

terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya agar mengoptimalkan implementasi kegiatan-kegiatan strategisnya dengan menggunakan instrumen analisa dan data yang terukur sesuai standar akademik.

Akhirnya kami berharap semoga laporan TPB/SDGs tahun 2024 yang menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam berkontribusi membangun daerah NTB dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi pertimbangan perencanaan pembangunan daerah NTB di masa mendatang. Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini baik dari sisi konten, materi maupun tata naskah masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan laporan selanjutnya sangat kami harapkan.

Mataram, September 2025
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr.Ir.H.Iswandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)	5
BAB III PEMBELAJARAN BAIK TPB/SDGS	126
BAB IV PENUTUP	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	138



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. TPB/SDGs dalam pencapainnya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber



pembiayaanya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RPD) Provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa Tenggara Yang Inklusif Dan Berkelanjutan yang diwujudkan dengan Tiga pilar utama yaitu dimensi pembangunan manusia (People) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (Kuat), dimensi pembangunan lingkungan (Planet) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Yang Lestari Dan Asri Dan Dimensi Pembangunan kesejahteraan (Prosperity) Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri. Selanjutnya tiga pilar pendukung meliputi dimensi tata kelola (governance), dimensi pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan dimensi daya saing daerah (Competitiveness). Dari tujuan ini terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPD Provinsi NTB 2024 – 2026.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPD 2024-2026, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.



Sinergi antara RPJMN 2020-2024 RPD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber



lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun non pemerintah.



BAB II

TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



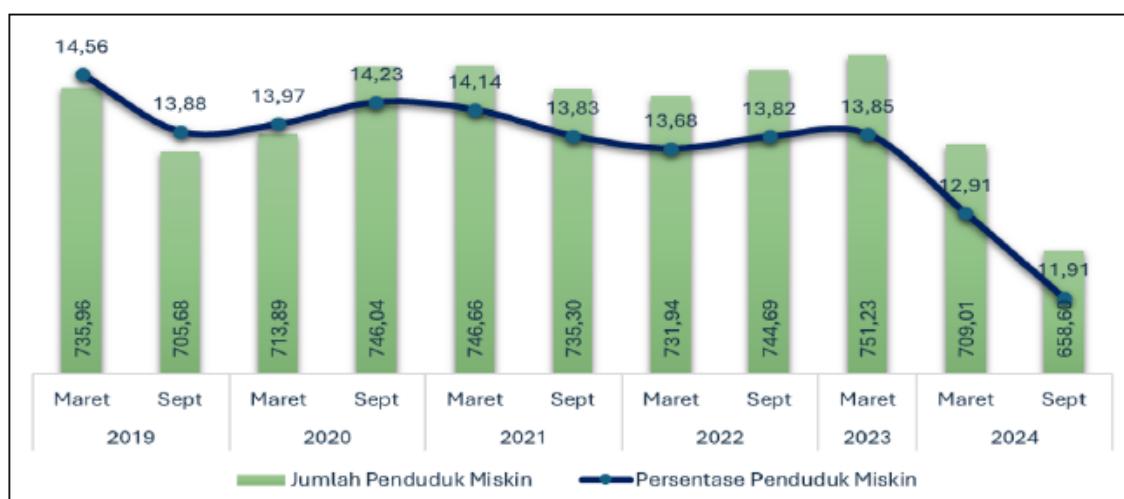
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari						
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.(PPP: \$ 1,9 per hari)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	2,64	2,04	Semua OPD
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	13.42	11,91	Semua OPD
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan Upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	persen	32	41	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat.						
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Air minum)	Susenas Kor (BPS)	Persen	52,61	82,0	Dinas Kesehatan
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Penyehatan Dasar) Cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas Kor (BPS)	Persen	75,48	77,04	Dinas Kesehatan
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Sanitasi)	Susenas Kor (BPS)	Persen	85,11	89	Dinas Kesehatan
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas	Susenas Kor (BPS)	Persen	91,35	91.93	Badan Pertanahan Nasional



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
	tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe					
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB	per 100.000 orang	12,22	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB	Persen	86,27	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keadaan dan Kecendrungan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 11,91 persen, menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar



11,64 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.

Tantangan dan Pembelajaran

Persentase kemiskinan Provinsi NTB tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Perkembangan angka kemiskinan yang masih naik-turun ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi dan perlunya penguatan program perlindungan sosial serta ketepatan dalam mengintervensi masyarakat miskin. Pemulihan ekonomi semakin membaik pada 2023-2024, berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan yang signifikan pada tahun 2024. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mengamatkan 3 strategi yang digunakan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tanggal 12 September 2023 perihal program, kegiatan, sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memprioritaskan kegiatan yang



mensasar langsung masyarakat miskin dan berorientasi kepada peningkatan pendapatan agar tergadruasi dari kemiskinan menjadi rujukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga persentase angka kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan dari 13,85 persen pada bulan maret tahun 2023 menjadi 11,91 persen pada bulan september 2024. Meskipun capaian persentase penurunan kemiskinan cukup signifikan namun jumlah penduduk miskin masih tinggi secara absolut yaitu sebesar 658.600 jiwa, kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan populasi NTB yang sejalan dengan perbaikan taraf hidup.

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data sasaran program P3KE belum dipakai sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, strategi pelaksanaan yang belum berjalan efektif dan kualitas SDM yang rendah dan bantuan adalah bantuan berupa kebutuhan dasar. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

Upaya Percepatan Pencapaian

Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya antara lain; membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpilar, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah NTB tahun 2024 diantaranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada Perangkat



Daerah melalui program dan kegiatan perangkat Daerah. Adapun pagu dan realisasinya sebagai berikut:

NO	Nama Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232.554.238.063	228.405.585.812
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	139.583.600	138.683.600
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	309.750.000	302.842.915
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.839.915.045	6.945.662.707
5	Dinas Ketahanan Pangan	1.880.418.000	1.818.684.000
6	Dinas Kesehatan	67.125.463.530	65.375.632.995
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	5.246.269.700	4.972.111.101
8	Badan Penanggulangan Daerah	925.140.000	818.517.615
9	Dinas Koperasi UKM	3.620.709.775	3.499.577.954
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	137.622.100	16.380.880
11	Dinas Sosial	60.928.108.286	56.883.730.915
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.331.812.000	11.219.573.200
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	784.800.000	740.180.000
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	235.606.580	170.674.879
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.210.000.000	2.204.931.700
TOTAL		395.269.436.679	383.512.770.273

Sumber : LP2KD tahun 2024

Adapun realisasi Program Pendekatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 :

NO	Strategi	Nama Perangkat Daerah	Realisasi	Pagu (DPA)
1	Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat (Bansos, Subsidi listrik, Subsidi Air, RTLH, JKN dll)	DP3AP2KB Provinsi NTB	16.380.880	137.622.100
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	3.499.577.954	3.620.709.775
		Dinas Kesehatan Provinsi NTB	65.375.632.995	67.125.463.530
		Dinas Ketahanan Pangan NTB	1.818.684.000	1.880.418.000
		Dinas Pendidikan NTB	1.456.171.700	2.210.000.000
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	302.842.915	309.750.000
		Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB	818.517.615	925.140.000
	Total		73.287.808.059	
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat (UMKM, KUR, Padat karya dll)	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi	740.180.000	784.800.000
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	170.674.879	235.606.580
		Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	11.720.518.180	11.331.812.000
		Dinas Sosial NTB	56.883.730.915	60.928.108.286
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	35.158.600	139.583.600
	Total		69.550.262.574	



NO	Strategi	Nama Perangkat Daerah	Realisasi	Pagu (DPA)
3	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Infrastruktur, akses pelayanan dasar dll)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	178.998.562.196	232.554.238.063
		Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	4.972.111.101	5.246.269.700
		Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTB	103.525.000	139.583.600
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	6.077.122.682	7.839.915.045
	Total		191.019.861.004	

Sumber data : LP2KD tahun 2024



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengungawab
Target 2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas Kor (BPS)	Persen	2,17	2,74	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Propil Kesehatan NTB 2024 (E-PPGBM)	Persen	13,47	12,22	Dinas Kesehatan
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Propil Kesehatan NTB 2024	Persen	5,70	6,37	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021	Persen	92,43	93,27	Dinas Ketahanan Pangan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.						
2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas (BPS)	Rupiah per tenaga kerja	38.122.544	3.819.532	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.						
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	BPS	Indeks	-0,17	0,87	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Keadaan dan Kecendrungan

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi



pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Kondisi rentan rawan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh masih masih rendahnya produksi pangan di wilayah itu dibandingkan dengan kebutuhan, kemudian tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.



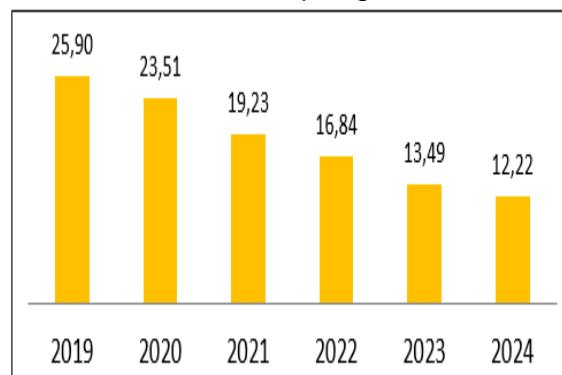
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu: 1) Kecukupan ketersediaan bahan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3)

Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan 4) Kualitas/keamanan bahan pangan yang digunakan

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor

Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan pangan yang menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2024

pangan penduduk. Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Provinsi NTB terlihat bahwa Pola Pangan Harapan setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terlihat dari angka 91,30 persen pada tahun 2019



meningkat menjadi 93,27 persen pada tahun 2024. Terdapat peningkatan sebesar 1,97 persen artinya status pangan dan gizi Masyarakat NTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Program Pola pangan harapan juga berdampak pada stunting di NTB. Persentase Balita stunting dari tahun sejak tahun 2019 konsisten mengalami penurunan dari 25,50 persen pada tahun 2019 menjadi menjadi 13,49 persen pada Tahun 2023, dan tahun 2024 sebesar 12,19 persen.

Sementara itu, data dari 10 kabupaten dan kota di NTB, delapan di antaranya mencapai perkembangan stunting dengan tren penurunan positif. Sumbawa Barat 7,36 persen; Kota Mataram 8,11; Sumbawa 8,95 persen; Kota Bima 10,21; Lombok Tengah 10,39; Lombok Barat 10,48; Dompu 10,73; Bima 10,95; Lombok Utara 14,69 dan Lombok Timur 17,35.

Tantangan dan Pembelajaran

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan menjadi tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat adalah : Masih cukup tingginya persentase penduduk miskin; b. Masih adanya daerah dan penduduk yang terkategori rentan rawan pangan; c. Semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam; d. Masih terjadinya fluktuasi dan gejolak harga pangan pokok strategis; e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar (terutama air bersih dan kesehatan); dan f. Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, khususnya berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap kekeringan dan banjir; g. Masih dijumpainya praktik-praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Hal ini menyebabkan terjadinya potensi kontaminasi, yang dapat meningkatkan resiko penyakit bawaan makanan; h. Kualitas Konsumsi Pangan penduduk yang masih belum beragam dan didominasi oleh konsumsi bahan pangan nabati.



Untuk penurunan angka stunting masih ada dua kabupaten lainnya yang masih menjadi PR Pemprov NTB yang saat ini harus dan terus dilakukan pendampingan secara konsisten dan berkesinambungan, adalah Kabupaten Lombok Timur 17,24 persen dan Lombok Utara 18,03 persen.

Kebijakan dan Strategi

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah dilaksanakan sebagai Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok baik di Tingkat produsen maupun konsumen. Ruang lingkup Gerakan Pangan Murah di Provinsi NTB pada Tahun 2024 melalui dana dekonsentrasi adalah sebanyak 34 kali yang terdiri dari 14 kali yang dilakukan oleh Provinsi dan masing-masing 2 kali di 10 Kabupaten/Kota. Adapun indikator pelaksanaan GPM meliput: a) terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan, b) faktor isu nasional menjelang hari besar keagamaan dan Nasional, c) kebijakan harga pemerintah (Harga Pembelian Pemerintah), Harga Acuan Pembelian/Harga Acuan Penjualan dan Harga Eceran Tertinggi (HET), d) indikator stabilisasi harga ditingkat konsumen sebagai early warning system.

Promosi Pangan B2SA merupakan kegiatan yang dirancang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai pola konsumsi B2SA, dengan harapan terbentuk pola konsumsi pangan yang sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Bentuk kegiatan promosi pangan B2SA meliputi: B2SA Goes to School, Gerakan/Kampanye B2SA, dll. B2SA Goes to School adalah kegiatan edukasi konsumsi B2SA kepada siswa. Pada Tahun 2024, di Provinsi Nusa Tenggara Barat di laksanakan Kegiatan B2SA Goes to School di 10 Sekolah.

Upaya Percepatan Pencapaian

Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan



rumah pangan lestari, serta terpantau arus keluar masuk komoditas pangan strategis.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan tersebut antara lain adalah : (1) Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) Peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu; (4) Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluhan pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (6) Penyediaan benih unggul dan bersertifikat untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura; (7) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta (8) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pen ngungawab
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup						
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas Kor (BPS)	Persen	98,60	98,17	Dinas Kesehatan
	Persentase persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	86,4	71,44	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Kab/Kota	6	6	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Per 1.000 orang	0,06	0,04	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/kota	8	7	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas (Kemenkes)	Persen		96,6	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Presentase Penderita Hipertensi umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	65,1	60,5	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Presentase Diabetes Militus umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	19,8	16,2	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	19,70	22,80	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Presentase obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	1,9	1,4	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Kementerian Kesehatan	orang	373	386	BNN
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Badan Narkotika Nasional	orang	189	171	BNN



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pena nggungawab
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)	SDKI	persen	73,22	83,0	Dinas Kesehatan
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Sensus Penduduk Long Form 2020	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,41	2,43	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Sensus Penduduk Long Form 2020	persen	48,58	38	Dinas Kesehatan
	Angka kelahiran remaja (umur 10-<18 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinas Kesehatan	persen	6,70	6,24	Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas Kor (BPS)/ NTB satu data	persen	9,04	8,24	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Persen	97,31	99,6	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	32,79		Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Kesehatan	persen	20,7	18,2	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 10-21 tahun	Dinas Kesehatan	persen	10,0	11,5	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK	Susenas kor maret 2015-2023	persen	95,7	84,1	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pena nggungawab
	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT	Susenas kor maret 2015-2023	persen	91,3	71,9	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan	Susenas kor maret 2015-2023	persen	70,80	71,1	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Kemenkes): Laporan Rutin Ditjen Farmalikes	persen	98,86		Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota	Dinas Kesehatan	persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), Ditjen Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk			Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi spesialis			0,01	0,01	
	Kepadatan dan distribusi bidan			1,45	1,41	
	Kepadatan dan distribusi dokter umum			0,25	0,26	
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi			0,04	0,05	
	Kepadatan dan distribusi perawat			2,22	2,17	
	Kepadatan dan distribusi tenaga apoteker			0,11	0,11	
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi			0,19	0,20	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan			0,10	0,10	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Masyarakat			0,15	0,16	



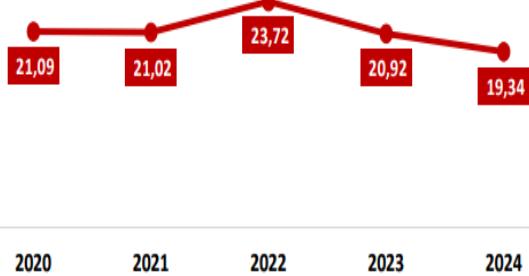
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baselin e 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pen ngungawab
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan tradisional			0,0004	0,0002	
	Kepadatan dan distribusi tenaga psikolog klinik			0,005	0,005	
	Kepadatan dan distribusi tenaga teknik biomedik			0,36	0,32	
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterapiam fisik			0,050	0,05	

Keadaan dan Kecendrungan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Umur Harapan Hidup (UHH), angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat. Perkembangan penyakit di Provinsi NTB, yang terbagi menjadi kelompok penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular vektor dan zoonotik serta penyakit tidak menular.

Morbiditas adalah keadaan sakit atau terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Morbiditas merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi yang

Perkembangan Angka Morbiditas Provinsi NTB

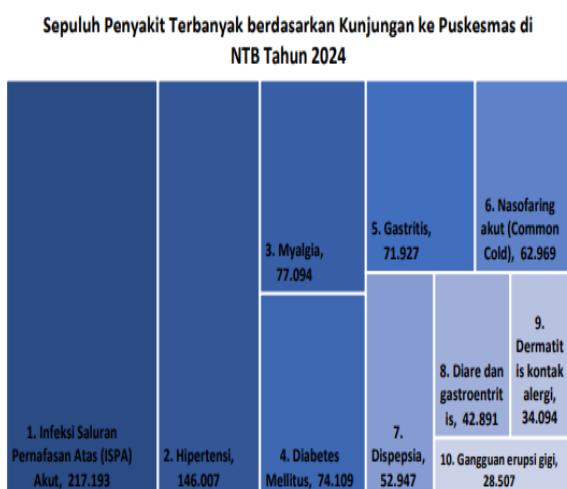


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2024



mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang sering kali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko.

Angka morbiditas yang dirilis oleh BPS dari hasil Susenas menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan atau sakit sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka morbiditas Provinsi NTB pada tahun 2024 sebesar 19.34 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2024, sekitar 19-20 orang dari 100 penduduk di Provinsi NTB mengalami keluhan kesehatan yang menganggu aktivitasnya sehari-hari. Selama 2 tahun terakhir, angka morbiditas Provinsi NTB mengalami penurunan. Setelah sempat mencapai 23,72 persen pada tahun 2022, angka morbiditas di Provinsi NTB menurun menjadi 20,92 persen pada tahun 2023 dan menjadi kurang dari 20 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan pada penduduk Provinsi NTB.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, 2024

10 penyakit terbanyak pada tahun 2024 adalah infeksi pada saluran pernafasan bagian atas. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan masyarakat. Penyakit tidak menular seperti hipertensi, gastritis dan diabetes melitus masuk ke dalam 5 besar penyakit terbanyak di puskesmas. Perubahan gaya hidup seperti kurangnya aktivitas serta konsumsi

fast food, minuman manis dan rokok menjadi pemicu tingginya ketiga penyakit tersebut. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi NTB dihadapkan pada beban ganda. Tidak hanya kasus penyakit infeksi/menular yang masih tinggi, penyakit tidak menular pun semakin meningkat. Selain perlunya peningkatan kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, perubahan perilaku masyarakat lewat promosi kesehatan perlu ditingkatkan.

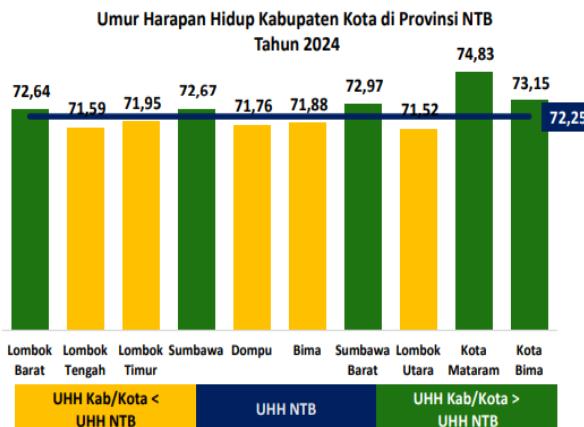
Tantangan dan Pembelajaran

Tahun 2024 Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yakni lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Indikator utama derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi NTB digambarkan melalui Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka morbiditas penyakit.

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan akan menurunkan daya beli masyarakat, sebaliknya pada masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan, daya belinya cenderung lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Apabila melihat trend angka kematian bayi yang cenderung menurun, maka diperkirakan AHH NTB akan mengalami peningkatan.

Selama periode 2020 – 2024, UHH di



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2024



NTB terus mengalami peningkatan, begitu juga UHH secara nasional. Meskipun demikian, nilai UHH NTB masih di bawah UHH nasional sebesar 74.15. Tetapi laju peningkatan UHH di NTB lebih besar dibandingkan nasional. UHH di NTB meningkat sebesar 1.08 tahun selama periode tahun 2020 – 2024. Sedangkan UHH nasional pada periode yang sama naik sebesar 0.78 tahun.

Dari 10 (sepuluh kabupaten) kota di Provinsi NTB, UHH tertinggi adalah UHH Kota Mataram dengan nilai 74.83 tahun. UHH Kota Mataram ini juga lebih tinggi dibandingkan UHH nasional. Kabupaten dengan UHH paling rendah adalah Kabupaten Lombok Utara, dengan UHH 71.52. Kabupaten Lombok Utara ini merupakan kabupaten termuda di Provinsi NTB. UHH di daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima lebih tinggi dibandingkan UHH di kabupaten. terdapat 5 (lima) kabupaten yang mempunyai UHH di bawah UHH Provinsi NTB, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima dan Lombok Utara. Angka kematian bayi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi AHH Provinsi NTB.

Kebijakan dan Strategi

UHH tahun 2024 meningkat 0.23 tahun atau naik 0.32 persen dibanding tahun sebelumnya, Salah satu hal yang mempengaruhi UHH adalah angka kematian bayi. Atensi lainnya, pemprov dengan program yang ada juga berusaha, menekan angka kematian ibu dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular Hal ini juga bertujuan agar derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya meningkatkan umur harapan hidup melalui berbagai kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada tahun 2024, umur harapan hidup bayi yang baru lahir di NTB mencapai 72.25 tahun, meningkat 0.23 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh berbagai upaya, termasuk penurunan angka kematian bayi, peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Kebijakan dan Upaya yang Dilakukan untuk Peningkatan Kesehatan:



1. Penurunan Angka Kematian Bayi: Pemerintah terus berupaya menekan angka kematian bayi melalui berbagai program kesehatan, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi dan penanganan stunting.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Pelayanan antenatal terpadu (AnC) menjadi perhatian, termasuk penanganan komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu hamil.
3. Pengendalian Penyakit: Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular terus ditingkatkan

Peningkatan Pendidikan:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS): Peningkatan HLS penduduk umur 7 tahun, yang pada tahun 2024 mencapai 13,98 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Peningkatan RLS penduduk umur 25 tahun ke atas, yang pada tahun 2024 mencapai 7,87 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan Ekonomi:

1. Peningkatan Pengeluaran Per Kapita: Peningkatan pengeluaran ril per kapita per tahun (yang disesuaikan) menjadi Rp11.606.000, meningkat Rp 511.500 (4,61%) dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Peningkatan Infrastruktur: Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, juga menjadi fokus untuk mendukung peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 untuk meningkatkan umur harapan hidup dan pencegahan penyakit difokuskan pada upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB No. 8 Tahun 2024. Peraturan Gubernur ini mengatur program yang bertujuan untuk: a.



menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Selain itu, NTB juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN. Melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan, cakupan JKN terus meningkat setiap tahunnya. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penduduk NTB dari tahun 2020 hingga 2024, mengalami peningkatan bertahap dari 79,40 persen pada 2020 menjadi 99,84 persen pada 2024. Pada tahun awal, 2020 dan 2021, cakupan masing-masing mencapai 79.40 persen dan 84,70 persen, menunjukkan upaya awal untuk memperluas akses kesehatan. Namun, tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 82.90 persen. Pada 2024, cakupan meningkat menjadi 99.84 persen, menandakan bahwa hampir seluruh penduduk NTB telah tercakup dalam JKN, dengan peningkatan 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Lonjakan besar antara 2022 dan 2023 menunjukkan keberhasilan strategi kesehatan. Meski demikian, tantangan kecil seperti keberlanjutan pendanaan atau akses di wilayah terpencil mungkin masih perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas program ini ke depannya.



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggawab
Target 4.1 pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif						
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang: (a) PAUD/Sederajat; (b) SD/Sederajat; (c) SMP/Sederajat; dan (d) SMA/Sederajat)	Susenas Kor (BPS)	Persen			Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,21	0,29	Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	3,85	4,60	Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	15,48	17,22	Dinas Pendidikan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Susenas Kor (BPS)	Persen			Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	98,11	98,72	Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,95	94,74	Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	63,66	66,23	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar						
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Susenas Kor (BPS)	Persen	96,94	94,85	Dinas Pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas						
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor (BPS)	Persen	32,99	34,20	Dinas Pendidikan
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,52	95,93	Dinas Pendidikan

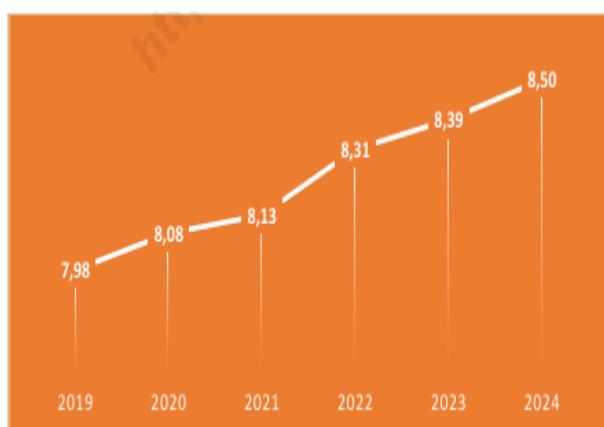


Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggawab
	informasi dan komunikasi (TIK).					
	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,52	95,93	Dinas Pendidikan
	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)	Persen	69,55	75,30	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Partisipasi Angka Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuntil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Susenas Kor (BPS)	Persen			Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk (a) perempuan/ laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	100,43	98,57	Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	101,27	92,28	Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat: (c) kuntil terbawah/atas	Susenas Kor (BPS)	Persen	93,13	89,85	Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat: (a) perempuan/laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	101,80	95,79	Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat: (c) kuntil terbawah/atas	Susenas Kor (BPS)	Persen	88,17	95,77	Dinas Pendidikan
	Rasio Partisipasi Angka Kasar (APK) pada tingkat	Susenas Kor (BPS)	Persen	98,10	92,57	Dinas Pendidikan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggawab
	SMA/sederajat: (b) perwredesaan/perkotaan					
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi: (a) perempuan/laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	80,7	105,23	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas Kor (BPS)	Persen	89,11	97,69	Dinas Pendidikan

Keadaan dan Kecendrungan



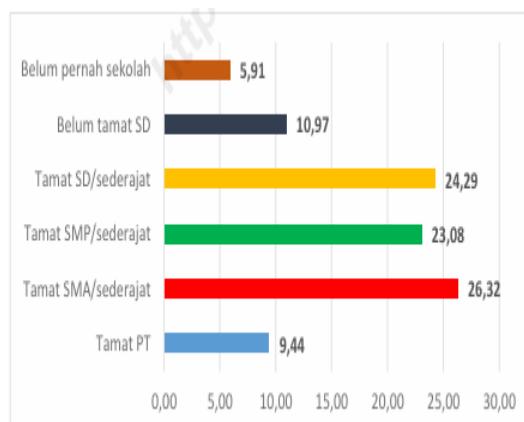
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar United Nation Development Program (UNDP) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Oleh karena itu, RLS menjadi salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.



Grafik diatas menunjukkan bahwa RLS penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2024 di NTB mencapai 8,50 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SMP (kelas VIII) atau putus sekolah dikelas 3 SMP (Kelas IX). RLS cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2024. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan angka RLS di tahun 2023-2024 tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 0.11 poin.

Gambaran kualitas SDM di Provinsi NTB dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas yang disajikan pada Gambar diatas. Terdapat sebanyak 26.32 persen penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA sederajat, 23.08 persen lulusan SMP sederajat, 24.29 persen tamatan SD sederajat, dan hanya 9.44 persen yang lulus dari perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3). Namun masih ada 16,88 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD sederajat. Tingginya masyarakat yang tidak mempunyai ijazah dapat disebabkan karena penduduk tua dan dewasa tidak mendapatkan akses yang baik untuk pendidikan di masa lalu



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tantangan dan Pembelajaran

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menunjang kehidupan manusia karena dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (Education for All).



Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih banyak aspek lain yang masih perlu diperhatikan. Kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang serta dukungan ketersediaan data pendidikan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia maju. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing dan kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kualitas hidup dapat lebih baik dari generasi sebelumnya

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Partisipasi pendidikan prasekolah/PAUD. Data disajikan menurut jenis kelamin, klasifikasi desa, dan keadaan ekonomi rumah tangga. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan pendidikan di wilayah NTB.

Pemerataaan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya menambah jumlah fasilitas pendidikan, meningkatkan mutu, dan melakukan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi

Pada tahun 2024, sebanyak 8,23 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah bersekolah, 25,50 persen masih bersekolah, dan 66,27 persen sudah tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk yang tidak/belum



pernah sekolah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 8,95 persen menjadi 8,23 persen.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi NTB dalam peningkatan RLS yaitu:

1. Pemerataan Akses Pendidikan
 - a. Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan
 - b. Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas
2. Kualitas Guru
 - a. Integritas dan profesionalisme guru
 - b. Kualifikasi guru yang tidak sesuai
 - c. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional
3. Fasilitas dan Sarana Pendidikan
 - a. Infrastruktur yang tidak memadai
 - b. Akses internet terbatas
4. Kualitas Pembelajaran
 - a. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi
 - b. Kurikulum yang belum sepenuhnya relevan
5. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat
 - a. Rendahnya latar belakang pendidikan orang tua
 - b. Peran serta masyarakat yang terbatas

Berikut beberapa poin penting terkait pendidikan di NTB:

1. Program Pembelajaran Mendalam (PM)

PM bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa, serta mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek.

2. Penguatan Literasi:

Program RELASI (Relawan Literasi), kolaborasi antara LPTK NTB dan KNTBM, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa sekolah dasar, terutama di masa pandemi.

3. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB):

NTB menjadi salah satu wilayah yang mempersiapkan pelaksanaan SPMB yang inklusif, transparan, dan berpihak pada peserta didik.



4. Kualitas Pendidikan:

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB, termasuk peningkatan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, dan penguatan kepemimpinan pendidikan.

5. Data dan Riset:

Data dan riset, seperti yang dilakukan oleh INOVASI, digunakan untuk memahami tantangan dan peluang dalam dunia pendidikan di NTB, serta untuk merumuskan solusi yang tepat.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah. Beberapa fokus utama meliputi peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, pengadaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan daerah dan potensi lokal. Selain itu, NTB juga aktif dalam program-program peningkatan literasi dan numerasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Pemerintah daerah NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terus berupaya meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan professional. Terdapat upaya untuk mendorong guru-guru meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka, termasuk melalui program studi lanjutan. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk pemberian tunjangan dan insentif lainnya, untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas.

Pengembangan Sarana dan Prasarana melalui DAK Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pengadaan alat praktik dan peraga bagi SMK, baik negeri maupun swasta. Pemerintah daerah terus berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah NTB, termasuk di daerah terpencil. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di



sekolah-sekolah untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah dan potensi lokal, serta memperhatikan kearifan local, Pelaksanaan program-program literasi dan numerasi untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa, Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dan Mendorong penerapan model pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Pemerataan Akses Pendidikan melalui Penerapan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang inklusif, transparan, dan berpihak pada peserta didik, Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan Pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk meningkatkan angka lama sekolah di NTB, beberapa upaya dapat dilakukan, termasuk meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah. Selain itu, program seperti Sekolah LISAN yang berfokus pada pembentukan karakter ramah lingkungan sejak dini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan

Beberapa Upaya yang dilakukan adalah 1. Peningkatan Kualitas Guru: Melalui pelatihan dan pengembangan profesional, guru dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan membimbing siswa.2. Perbaikan Infrastruktur Sekolah: Memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. 3. Pengurangan Angka Putus Sekolah: Identifikasi penyebab putus sekolah (baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi) dan berikan dukungan yang sesuai, seperti beasiswa atau bantuan lainnya.4. Program Sekolah LISAN: Program ini, yang berfokus pada pembentukan karakter ramah lingkungan, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga lingkungan.



5. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan, misalnya melalui program orang tua asuh atau dukungan finansial, dapat memberikan dampak positif pada angka lama sekolah. 6. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait (pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait) untuk memastikan implementasi program yang efektif dan berkelanjutan. 7. Penghargaan: Memberikan penghargaan kepada individu atau lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kualitas dan angka lama sekolah



Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas Kor (BPS)	Persen	14,92	14,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	KPU	Persen	15		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah : DPRD	KPU	Persen	1,53	10,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Sakernas (BPS)	Persen	32,43	29,63	Badan Kepgawainan Daerah
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (a) kelompok WUS	SDKI 2012 dan 2017	persen	27,12	59,78	Dinas Kesehatan
	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (b) kelompok PUS	SDKI 2012 dan 2017	persen	38,71		Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggungawab
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. ≥ 5 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	61,48	63,38	Dinas Komunikasi dan informatika
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. ≥ 0 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	56,26	58,04	Dinas Komunikasi dan informatika

Keadaan dan Kecendrungan

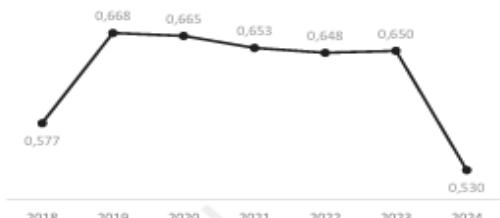
NUSA TENGGARA BARAT

IKG 2024: 0,530

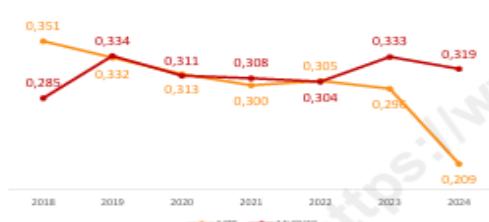
Rata-Rata Pertumbuhan IKG 2018–2024: 1,41

Tabel 6.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IKG Nusa Tenggara Barat, 2024

Indikator	Capaian	Rata-Rata Pertumbuhan 2018–2024(%)						
		(1)	(2)	(3)				
MTF	0,209	-8,28						
MHPK20	0,319	1,90						
Percentase Anggota Legislatif	<table> <tr> <td>Laki-Laki</td> <td>89,23</td> <td>-0,28</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>10,77</td> <td>2,61</td> </tr> </table>	Laki-Laki	89,23	-0,28	Perempuan	10,77	2,61	
Laki-Laki	89,23	-0,28						
Perempuan	10,77	2,61						
Percentase Penduduk Berpendidikan SMA ke atas	<table> <tr> <td>Laki-Laki</td> <td>39,22</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>29,45</td> <td>3,21</td> </tr> </table>	Laki-Laki	39,22	1,62	Perempuan	29,45	3,21	
Laki-Laki	39,22	1,62						
Perempuan	29,45	3,21						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	<table> <tr> <td>Laki-Laki</td> <td>86,47</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>68,04</td> <td>3,84</td> </tr> </table>	Laki-Laki	86,47	1,30	Perempuan	68,04	3,84	
Laki-Laki	86,47	1,30						
Perempuan	68,04	3,84						



Gambar 6.91 Perkembangan IKG Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Gambar 6.92 Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Nusa Tenggara Barat, 2018–2024

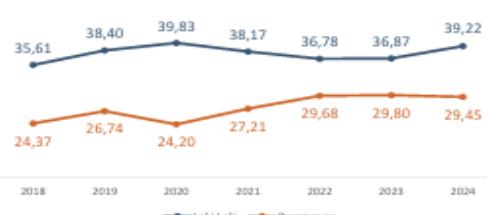
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan, 2018–2024



Gambar 6.94 Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Gambar 6.93 Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Gambar 6.95 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berpendidikan SMA ke atas Nusa Tenggara Barat, 2018–2024



Pada tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB sebesar 0,530 turun sebesar 0,120 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,650. Penurunan sebesar 0,120 poin tahun ini merupakan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Selain itu penurunan IKG Provinsi NTB ini menunjukkan perbaikan yang signifikan karena pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Provinsi NTB mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Sejak 2019, IKG Provinsi NTB mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,028 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,138 poin selama lima tahun terakhir.

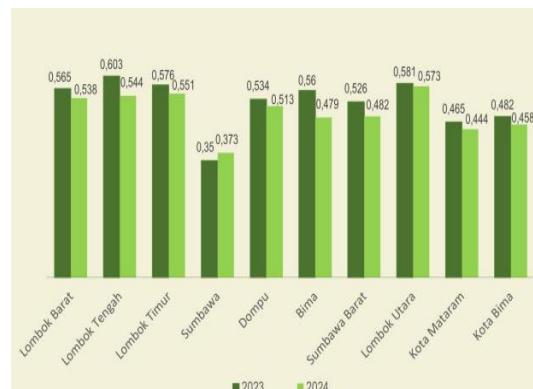
Penurunan IKG Provinsi NTB 2024 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Pada tahun 2024 keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat dari 1,54 persen menjadi 10,77 persen, dan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 62,54 persen pada tahun 2023 menjadi 68,04 persen pada tahun 2024, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat dari 84,18 persen pada tahun 2023 menjadi 86,47 persen pada tahun 2024.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang konsisten pada ketiga dimensi pembentuknya. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia telah berhasil diminimalisir. Sementara itu, dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja juga mengalami perbaikan. Perkembangan indikator-indikator indeks ketimpangan Gender di NTB tahun 2019-2024 terlihat seperti gambar.

Selama kurun waktu 2019-2024 capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) di tingkat kabupaten/kota bervariasi antar kabupaten/kota. Pada tahun 2024 sebagian besar kabupaten/ kota mengalami penurunan IKG, hanya Kabupaten Sumbawa yang mengalami peningkatan IKG dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki



nilai IKG di atas IKG Provinsi NTB yaitu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa dengan capaian IKG 0,373 poin, sebaliknya ketimpangan gender yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara dengan capaian IKG 0,573 poin. Sementara itu lompatan capaian penurunan ketimpangan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bima dengan laju pertumbuhan mencapai -14,464 persen. Sebaliknya perkembangan kesenjangan yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Sumbawa dengan laju IKG mencapai 6,571 persen.



Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Ketimpangan Gender Adalah:

1. Mempertahankan dan Meningkatkan Pencapaian.

NTB termasuk dalam 22 daerah dengan ketimpangan gender di atas angka nasional. Namun, tren perbaikan IKG menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di NTB. Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang masih ada, terutama di sektor kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja. Peningkatan akses pendidikan, kesempatan kerja yang setara, dan partisipasi politik yang lebih inklusif menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi ketimpangan gender di NTB. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam upaya ini. Dengan kolaborasi yang kuat, NTB dapat terus memperbaiki IKG dan mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial.



2. Keterwakilan Perempuan di Posisi Strategis

Dimensi pemberdayaan menunjukkan persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA adalah laki-laki 39,22 persen dan perempuan 29,45 persen. Keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif yang sejauh ini masih jauh dengan angka sebesar 10,77 persen dan keterwakilan laki-laki mencapai 89,23 persen

3. Peran Ganda Perempuan

Perempuan seringkali menghadapi beban ganda dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan

4. Akses terhadap pelayanan kesehatan masih kurang terutama di daerah terpencil

5. Peran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif dalam upaya pengurangan ketimpangan juga menjadi tantangan.

Pembelajaran:

1. Peningkatan Pendidikan Perempuan

2. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

3. Perbaikan di Semua Dimensi IKG

4. Penurunan IKG secara keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan di berbagai dimensi penyusun IKG, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja

5. Penurunan Ketimpangan Spasial

Penurunan IKG terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di NTB, menunjukkan adanya perbaikan yang merata

6. Data dan Analisis yang Akurat

Penggunaan data dan analisis yang akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan kebijakan yang efektif.



Dengan terus memperhatikan tantangan dan mengambil pembelajaran dari perbaikan yang telah dicapai, NTB dapat terus bergerak menuju kesetaraan gender yang lebih baik di masa depan

Kebijakan dan Strategi

Strategi afirmatif dalam dimensi ini dijalankan melalui beberapa instrumen kebijakan yang saling mendukung. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, khususnya bagi remaja perempuan yang sudah menikah, yang sebelumnya menjadi kelompok yang kurang terjangkau oleh layanan formal. Aturan ini menekankan pentingnya edukasi kontrasepsi berbasis hak, konseling kesehatan seksual dan reproduksi, serta penyediaan layanan yang bersifat ramah remaja dan bebas stigma. Kedua, PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak menjadi landasan teknis dalam memastikan ketersediaan layanan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini mengatur pemenuhan standar minimal untuk puskesmas, rumah sakit, serta tenaga kesehatan dalam pelayanan kebidanan dan kandungan. Strategi afirmatif ini secara praktis telah dilaksanakan melalui penyediaan bidan desa, posyandu remaja, dan klinik ramah anak, yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terutama di provinsi dengan nilai MTF dan MHPK20 yang tinggi. Selain itu, penguatan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan melalui layanan berbasis masyarakat juga merupakan bagian dari strategi afirmatif yang telah berjalan. Program ini dikoordinasikan bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PPPA, dan BKKBN, dengan pendekatan lintas sektor melalui platform Generasi Berencana (GenRe) dan program Sekolah Siaga Kependudukan.

Strategi afirmatif dalam bidang politik telah diimplementasikan melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (Pasal 245). Ketentuan ini diperkuat



melalui penerapan sistem zipper, yaitu penyusunan daftar calon dengan pola bergantian antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan calon perempuan tidak ditempatkan di posisi yang tidak strategis (Pasal 246). Di sisi kelembagaan partai, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan tingkat pusat, serta mendorong rekrutmen dan pelatihan kader perempuan secara berkelanjutan.

Dari sisi penguatan sosial dan norma komunitas, strategi berbasis lokal terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan nilai dan perilaku. Praktik baik seperti pelibatan tokoh adat dan agama dalam Forum Anak Daerah, Forum Musyawarah Desa yang inklusif gender, dan pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan telah dilaporkan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Kegiatan edukasi publik melalui PKK, posyandu, serta media lokal juga perlu diperluas dengan pendekatan budaya yang sesuai

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan Gender (IKG) di NTB tahun 2024, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Fokus Upaya:

1. Peningkatan Kualitas SDM
 - a. Memastikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja.
 - c. Mengurangi angka putus sekolah pada perempuan
2. Pemberdayaan Ekonomi
 - a. Mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
 - b. Memberikan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan



- c. Menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.
- 3. Perlindungan Perempuan
 - a. Menjamin hak-hak reproduksi perempuan
 - b. Melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, baik di dalam maupun di luar rumah
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi.
- 4. Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 - a. Mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik lainnya
 - b. Memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pengambilan keputusan.
- 5. Pengukuran dan Evaluasi:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap IKG di NTB
 - b. Menggunakan data dan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus
 - c. Menyesuaikan strategi dan intervensi berdasarkan hasil evaluasi.

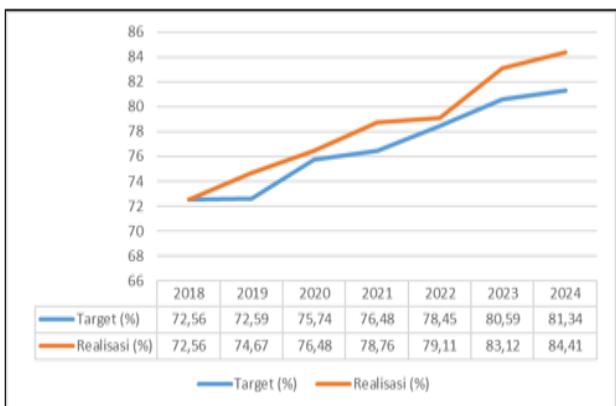
Kesetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga merupakan faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penngungawab
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua						
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak)	BPS	Persen	83,12	84,41	Dinas Pekerjaan Umum
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1*	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	persen	75,48	86,80	Dinas Kesehatan
6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	BPS	persen	85,11	86,80	Dinas Pekerjaan Umum
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global						
6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)	Kemantiran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	44,37	47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.						
6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)	Kemantiran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persen	64,97	66,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keadaan dan Kecendrungan

Dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi cakupan air minum secara konsisten meningkat, meskipun masih terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Misalnya, pada tahun 2024, target cakupan air minum ditetapkan sebesar 81,34%, sementara realisasi mencapai 84,41%. Capaian tersebut merupakan agregat dari capaian akses air minum kabupaten/kota dan layanan di kawasan strategis provinsi. Sedangkan akses air



Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB, 2024

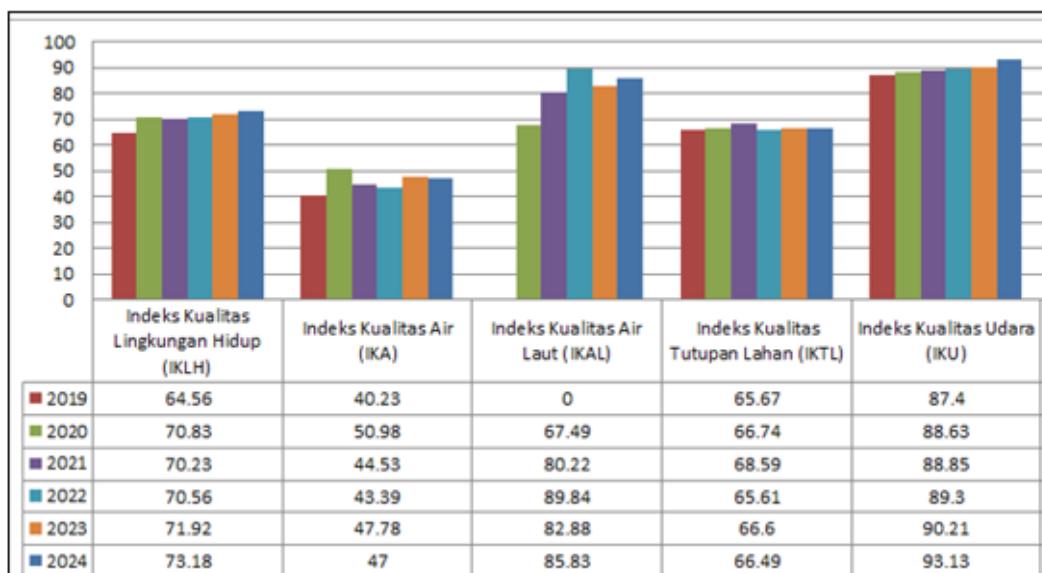
minum lintas kabupaten/kota yang merupakan standar pelayan minimum bidang urusan air minum provinsi masih dalam proses perencanaan berupa dokumen pra studi pembangunan SPAM Regional Lombok Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses layanan air minum telah masih perlu ditingkatkan pelayanannya.

Dari data diatas terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan dalam realisasi cakupan air minum dapat didistribusikan dalam berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan dan optimalisasi infrastruktur, pembinaan kelembagaan, penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Hal tersebut ini berfokus pada pencapaian target penyediaan akses layanan air minum/bersih layak dan aman, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani. Kondisi lingkungan hidup berkualitas sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas



Air Laut. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB digambarkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut



Sumber: NTB Satu Data (Diolah)

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan utama dalam penyediaan air minum layak di NTB pada tahun 2024 adalah memastikan akses universal ke air minum yang aman dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mencapai target 100% air minum layak yang ditetapkan dalam RPJMN. Pembelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta perlunya intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi tantangan sanitasi yang berkaitan erat dengan penyediaan air bersih. Tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi NTB berkaitan dengan penyediaan air minum layak adalah:

1. Aksesibilitas:

Masih ada rumah tangga di NTB, khususnya di daerah terpencil dan perdesaan, yang belum memiliki akses ke air minum layak.



2. Kualitas Air:

Kualitas air minum di beberapa daerah masih menjadi masalah, dengan potensi pencemaran dan kurangnya pengawasan terhadap sumber air.

3. Sanitasi yang Belum Layak:

Masalah sanitasi yang belum memadai, seperti jamban yang tidak memenuhi standar, dapat berdampak negatif pada kualitas air minum.

4. Keterbatasan Anggaran:

Pemerintah daerah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran dalam membangun dan memelihara infrastruktur air minum yang memadai.

5. Perubahan Iklim:

Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan dan ketersediaan air yang tidak menentu, yang mempengaruhi pasokan air minum.

Pembelajaran dalam pemenuhan pelayanan air minum layak adalah:

1. Peningkatan Kolaborasi:

Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai target penyediaan air minum layak.

2. Intervensi Berbasis Data:

Intervensi harus didasarkan pada data yang akurat mengenai kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap daerah.

3. Pendidikan dan Penyuluhan:

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting.

4. Pemanfaatan Teknologi:

Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah.

5. Pendekatan Berkelanjutan:

Pembangunan infrastruktur air minum harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan yang baik

Tantangan yang dihadapi pada pencapaian air minum masih tetap ada.

Perbedaan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa masih ada ruang



untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi program yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian target. Kondisi hidrologi di NTB mencerminkan tantangan dan potensi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta pengelolaan sumber daya air. Provinsi NTB memiliki dua Wilayah Sungai (WS) strategis nasional yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Provinsi NTB. Wilayah Sungai Lombok mencakup 197 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas total 4.738 Km2 dan WS Sumbawa memiliki 555 DAS dengan luas 15.095 Km2

Selanjutnya, untuk Pulau Sumbawa yang memiliki topografi lebih bervariasi dengan pegunungan dan dataran rendah dimana sungai umumnya lebih pendek dan memiliki debit yang fluktuatif terutama saat musim hujan. Potensi ketersediaan air WS Sumbawa di tahun 2015 sebesar $153.59 \text{ m}^3/\text{detik}$ dengan kebutuhan air total sebesar $49.53 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan diperkirakan akan meningkat menjadi $70,95 \text{ m}^3/\text{detik}$ di tahun 2035.

Meningkatnya kebutuhan air memberikan tantangan tersendiri, jika tren pertumbuhan populasi, pertanian dan industri terus meningkat tanpa strategi konservasi yang efektif, WS Lombok dan WS Sumbawa berisiko mengalami defisit air dalam jangka panjang. Tantangan dalam menjaga ketersediaan air di NTB dihadapkan pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrologi, termasuk banjir dan tanah longsor saat musim hujan, sementara kekeringan mengancam di musim kemarau. Secara keseluruhan, kondisi hidrologi NTB menunjukkan potensi sumber daya air yang besar dan saat ini mencukupi tetapi juga rentan terhadap variabilitas iklim dan tekanan antropogenik. Upaya pengelolaan sumber daya air secara terpadu seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan modernisasi sistem hidrologi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko bencana.



Ketersediaan air baku yang tidak merata dan banyaknya mata air yang hilang maupun tertutup akibat kerusakan tutupan lahan di daerah resapan dan tanah longsor akibat gempa menjadi tantangan dalam penyediaan layanan air bersih/minum. Di banyak lokasi juga didapatkan, bahwa infrastruktur penyediaan air minum terutama dari jaringan perpipaan banyak yang tidak berfungsi karena sambungan illegal dari oknum-oknum yang dilewati oleh jaringan pipa dan tidak berfungsi lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga infrastruktur tidak berfungsi secara berkelanjutan.

Penurunan kualitas air juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha peternakan/perikanan, industri, dan keperluan rumah tangga. Air sungai menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihian agar dapat layak digunakan. Selain itu, tingginya nilai E Coli disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Dalam penyediaan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat dibutuhkan kerjasama antar daerah dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kesadaran kolektif kita untuk menjaga kelestarian lingkungan juga wajib untuk ditingkatkan, karena potensi dan ketersediaan sumber air baku ini sangat bergantung pada kelestarian alam. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah memberikan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Provinsi NTB.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pemenuhan air minum layak di NTB pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan akses dan kualitas air minum bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Upaya ini melibatkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan air minum yang memenuhi standar kualitas.



Beberapa poin penting terkait kebijakan ini antara lain:

1. Peningkatan Akses:

Program seperti Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) terus diimplementasikan untuk memperluas akses air minum layak bagi masyarakat, termasuk di daerah yang sulit dijangkau.

2. Peningkatan Kualitas:

Upaya menjaga kualitas air minum dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemeliharaan sumber mata air, perlindungan kawasan resapan air, serta pengawasan kualitas air secara berkala.

3. Keterlibatan Masyarakat:

Program-program ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum, serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

4. Kerjasama Antar Stakeholder:

Pemerintah daerah, Perumda Air Minum, dan berbagai pihak terkait bekerja sama dalam upaya pemenuhan air minum layak di NTB.

5. Penanganan Krisis Air:

Pada musim kemarau, pemerintah daerah juga melakukan upaya khusus untuk memastikan ketersediaan air minum bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, misalnya dengan distribusi air bersih atau penyediaan sarana penampungan air.

Regulasi terkait air minum layak di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 mengacu pada Peraturan Gubernur NTB No. 8 Tahun 2024 yang fokus pada peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dan akses air minum. Selain itu, terdapat juga Peraturan Gubernur NTB No. 26 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya mengenai pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah provinsi. Target NTB di tahun 2024 adalah mencapai 100% akses air minum layak dan 84% sanitasi layak, termasuk 11% sanitasi aman, dengan tujuan mencapai 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) berdasarkan dokumen implementasi WASH.



Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian akses air minum layak 100% di NTB pada tahun 2024 dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk peningkatan infrastruktur yaitu Pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seperti SPAM Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, yang diharapkan dapat melayani ribuan sambungan rumah. Penyediaan sarana sanitasi yang layak, seperti SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat) di beberapa desa di Kabupaten Bima dan sinergi antar instansi terkait melalui. Pemanfaatan sumber air bersih yang berkelanjutan dan terkelola dengan baik, termasuk menjaga kelestarian sumber mata air dan hutan lindung.

Melalui pemberdayaan masyarakat melalui: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi, Mendorong replikasi program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) melalui dana APBD, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akses air minum layak dan sanitasi yang aman

Melalui Sinergi Antar Instansi: Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan air minum. Optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Hibah Air Minum Perdesaan/Perkotaan (HAMP) dan Koordinasi dan sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi.



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggungawab
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua						
7.1.1*	Rasio Elektifikasi	Kementerian ESDM	Persen	99,99	99,99	Dinas ESDM
7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita	Kementerian ESDM	Kwh/ka pita	748.742	748.742	Dinas ESDM
7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	Badan Pusat Statistik (Susenas).	persen	89,85	92,61	Dinas ESDM

Keadaan dan Kecendrungan

Peningkatan rasio elektrifikasi selama lima tahun terakhir juga dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat sejak tahun 2018 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KEL	JML DESA/KEL BERLISTRIK	KETERENGAN
1.	Kota Mataram	50	50	50 Desa/Kelurahan Listrik PLN
2.	Kab. Lombok Barat	122	122	122 Desa Listrik PLN
3.	Kab. Lombok Tengah	139	139	139 Desa Listrik PLN
4.	Kab. Lombok Timur	254	254	254 Desa Listrik PLN
5.	Kab. Lombok Utara	33	33	33 Desa Listrik PLN
6.	Kab. Sumbawa Barat	65	65	65 Desa Listrik PLN
7.	Kab. Sumbawa	165	165	160 Desa Listrik PLN dan 5 Desa listrik non PLN
8.	Kab. Dompu	81	81	81 Desa Listrik PLN
9.	Kab. Bima	193	193	193 Desa Listrik PLN
10.	Kota Bima	41	41	41 Desa/Kelurahan Listrik PLN
		1.140	1.140	

Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber Non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturrotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanleh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersebut berada pada



wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat layanan listrik, maupun sudah mendapat layanan listrik tetapi masih menyambung pada tetangganya. Sejak tahun 2012 hingga 2022 Pemerintah Provinsi telah melakukan pemasangan listrik murah dan hemat pada 24.981 rumah tangga sasaran yang bersumber dari anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya seperti CSR BUMN

Tantangan dan Pembelajaran

Selama tahun 2024 setidaknya ada tiga isu strategis yang menjadi perhatian khusus pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Isu tersebut terkait dengan program strategis yang masuk dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diantaranya terkait beberapa hal sebagai berikut yaitu: 1. Penyediaan akses listrik kepada masyarakat miskin ekstrim baik yang belum mendapatkan listrik maupun yang menggunakan listrik secara bersama dengan tetangganya; 2. Perluasan jaringan listrik untuk menjangkau kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) dan Kepulauan; 3. Penggunaan listrik untuk produktifitas melalui peningkatan listrik perkapita.

Permasalahan bidang ketenagalistrikan a. Sangat terbatasnya ketersediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah Provinsi NTB untuk biaya Verifikasi dan Evaluasi dokumen permohonan perizinan. b. Dokumen permohonan perizinan tidak ditembuskan kepada Dinas ESDM sebagai bahan evaluasi administrasi pertimbangan teknis. c. Keterlambatan pengiriman Izin



yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB (DPMPTSP NTB) ke ESDM prov. NTB d. Terkait status masyarakat miskin / tidak mampu yang telah terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan menerima bantuan listrik murah dan hemat daya 450 VA bersubsidi seringkali berubah-ubah sehingga menjadi kendala/penghambat disaat dilakukan pendaftaran sebagai calon pelanggan di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan. e. Harmonisasi pimpinan dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah sampai dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan terkait pelaksanaan pemasangan kWh meter yang sering tidak sinkron 22 f. Banyak Pelaku Usaha atau Badan Usaha baik pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Perorangan dan Lembaga/Badan Usaha lainnya yang belum mengetahui regulasi atau peraturan tentang ketenagalistrikan. oleh karena itu perlu dilakukan penyampaian informasi yang lebih luas melalui sosialisasi, surat imbauan, brosur,dsb g. Salah satu tugas dan fungsi di dalam Sub-Koordinator Pengawasan Ketenagalistrikan adalah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan (IUJPTL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum sepenuhnya dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan personil dan anggaran, sehingga diperlukan personil dan anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap badan usaha atau pelaku yang belum memiliki perizinan

Guna memenuhi kebutuhan dasar listrik beberapa stakeholder terkait yang dapat medukung pencapaian target pembangunan diantaranya PLN, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Sosial yang membidangi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

Kebijakan dan Strategi



Indikator ini menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor ketenagalistrikan pada PDRB NTB. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, pada tahun 2022 kontribusi sub sektor ketenagalistrikan terhadap PDRB Provinsi NTB sebesar 0,08% sedangkan pada tahun 2023 juga sama sebesar 0,08%. Dinas ESDM Provinsi NTB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang ketenagalistrikan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan kepada pemilik pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan sendiri baik sebagai sumber utama maupun cadangan. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan operasional pembangkit listrik yang dimiliki sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi kriteria aman, andal dan ramah lingkungan. Dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung capaian kinerja tersebut melalui program pemasangan listrik murah dan hemat. Intervensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik pada daerah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2024 Dinas ESDM Provinsi NTB mengalokasikan penyambungan bagi 195 RTS. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023 sebanyak 107.413 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN. Akses dari sejumlah masyarakat tsb di atas masih menggunakan listrik secara bersama, menggunakan genset/sel 44 tenaga surya dan tidak berlistrik sama sekali. Hal tersebut masih jauh dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengalokasikan anggaran pemasangan listrik bagi mayarakat miskin.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, kapasitas pembangkit yang direncanakan di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 adalah 953 MW. Sebagian besar pembangkit yang akan dibangun adalah PLTU batubara. Untuk meminimalkan penggunaan BBM terutama waktu beban puncak, direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/ Pembangkit Listrik Mobile Gas (PLTMG)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan bahan bakar gas alam yang disimpan dalam bentuk CNG (compressed natural gas). Sebagaimana diketahui, sistem Lombok saat ini dalam kondisi tanpa cadangan yang cukup dan bahkan seringkali mengalami defisit. Adanya penambahan beban yang terus meningkat dan rencana COD (Commercial Operation Date) beberapa proyek pembangkit non-BBM mundur dari jadwal, maka dalam dua hingga tiga tahun kedepan sistem Lombok diperkirakan masih akan defisit. Untuk mengatasi kondisi tersebut, di sistem Lombok akan dipasang mobile power plant (MPP) 50 MW dengan teknologi dual fuel (High Speed Diesel dan Gas).

Pembangunan pembangkit PLTU batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/ Pembangkit Listrik Mobile Gas (PLTMG)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), 38 panas bumi di beberapa lokasi akan diikuti dengan pembangunan transmisi untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke pusat beban melalui gardu induk. Selama periode 2015 - 2024 akan dibangun transmisi 150 kV di Sistem Lombok dan transmisi 70 kV di pulau Sumbawa meliputi Sistem Sumbawa dan Sistem Bima. Untuk menghubungkan sistem 70 kV Sumbawa dengan Sistem 70 kV Bima yang berjarak sekitar 140 km, akan dibangun transmisi interkoneksi 150 kV. Selain itu, untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke pusat beban di sistem 70 kV Sumbawa dan Bima, akan dibangun transmisi 150 kV. Dalam jangka panjang, yang akan dikembangkan di Pulau Sumbawa adalah sistem 150 kV.



Sesuai dengan proyeksi kebutuhan tenaga listrik di provinsi ini, direncanakan tambahan sambungan baru sampai dengan tahun 2025 sekitar 507.680 pelanggan. Tambahan sambungan ini juga untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Selaras dengan penambahan pelanggan tersebut, direncanakan pembangunan jaringan distribusi termasuk untuk listrik perdesaan, meliputi jaringan tegangan menengah 5.074 kms, jaringan tegangan rendah sekitar 4.072 kms dan tambahan kapasitas trafo distribusi sekitar 615 MVA. Adapun pengembangan jaringan distribusi ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang						
8.1.1.[a]	PDRB per kapita	BPS	Rupiah (ribu)	29.926	32,28	Semua OPD
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	(persen)	0,22	3,70	Semua OPD
8.2 Mencapai Tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	BPS	(persen)	-3,74	-4,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	(persen)	72,30	70,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	Rupiah	12.933	14.127	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	(persen)	2,80	2,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	(persen)	12,83	15,23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan						
8.6.1*	Percentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	(persen)	20,45	15,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya						
8.7.1.(a)	Percentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	(persen)	4,54	5,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya						
8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional	BPJS Ketenagakerjaan	persen			Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	BPS	persen	NA	NA	Dinas Pariwisata
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	BPS	persen	126.539	883.345	Dinas Pariwisata
8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS	persen	1.249.756	1.441.247	Dinas Pariwisata

Keadaan dan Kecendrungan

PERTUMBUHAN EKONOMI (y-on-y)



Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan IV-2024 mencapai Rp44,84 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp26,73 triliun. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,97 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi terdalam



sebesar 15,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi tertinggi sebesar 40,61 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 0,50 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 16,84 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 41,43 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat selama 2024 terhadap 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 11,26 persen



Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibanding Februari 2023. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (101,55 ribu orang); Konstruksi (35,62 ribu orang); dan Penyediaan Akomodasi Makan



dan Minum (22,44 ribu orang). Sebanyak 782,58 ribu orang (26,71 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,06 persen poin dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,09 persen). Sementara pekerja paruh waktu dan setengah penganggur masing-masing sebesar 23,50 persen dan 15,41 persen.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK), Desember 2024

 SENSUS
EKONOMI
2024

Hotel Bintang (persen), 2023-2024



TPK HOTEL BINTANG
Desember 2024

 m-to-m : 2,18 poin
(Des '24 thd Nov '24)

 y-on-y : -4,85 poin
(Des '24 thd Des '23)

Hotel Non Bintang (persen), 2023-2024



TPK HOTEL NON BINTANG
Desember 2024

 m-to-m : 0,49 poin
(Des '24 thd Nov '24)

 y-on-y : 0,85 poin
(Des '24 thd Des '23)

TPK Hotel Bintang Bulan Desember 2024 tercatat sebesar 38,42 persen, naik sebesar 2,18 poin dibandingkan TPK Bulan November 2024 tercatat sebesar 36,24 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang Bulan Desember 2023 sebesar 43,27 persen, TPK Hotel Bintang Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 4,85 poin. TPK Hotel Non Bintang Bulan Desember 2024 sebesar 25,74 persen, naik sebesar 0,49 poin dibanding TPK Hotel Non Bintang Bulan Desember 2023 sebesar 24,89 persen, maka TPK Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,85 poin. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2024 sebesar 1,72 hari dan mengalami penurunan sebesar 0,09 hari dibandingkan RLM Bulan November 2024 sebesar 1,81 hari. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2024 selama 1,46 hari dan mengalami penurunan sebesar 0,08 hari dibandingkan dengan RLM Bulan November 2024



sebesar 1,54 hari. Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2024 tercatat sebanyak 98.722 orang yang terdiri dari 74.071 orang Tamu Dalam Negeri (75,03 persen) dan 24.651 orang Tamu Luar Negeri (24,97 persen). Jumlah tamu yang menginap di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2024 tercatat sebanyak 91.668 orang yang terdiri dari 66.869 orang Tamu Dalam Negeri (72,95 persen) dan 24.799 orang Tamu Luar Negeri (27,05 persen)

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan kunjungan wisataan ke NTB pada tahun 2024 salah satunya dengan memperbanyak perhelatan atau kegiatan wisata. Kemudian memperbanyak promosi di luar daerah dan luar negeri, meningkatkan pelayanan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nama-nama even tahun 2024 : Porsche Sprint Challenge, Sedekah Ponan, Festival Bau Nyale, Merumatta Coast Trail, Pesona Khanza Ramadhan 2024 di NTB, Festival Rimpu Mantika, Lebaran Topat, Rinjani 100, L'etape Indonesia, Asia Road Racing Championship, MXGP Samota, Sykarara Begawai Jelo Nyesek, Festival Melala, MXGP Lombok, Alunan Budaya Pringgasela, Festival Lakey, Shell Eco Marathon, Sail Boat Race, Lombok Sumbawa Tenun Festival, Ballona Festival, Perang Topat, MotoGP Mandalika, Lombok Sumbawa Fair, Senggigi Sunset Jazz, Pacoa Jara, Alunan Budaya Pengadangan, Festival Perang Topat, Peosna Pantai Karakat, Festival Budaya Maloka, Maulid Adat Bayan, Lombok Syariah Festival.

Namun, tantangan utama yang dihadapi sektor pariwisata pada tahun ini adalah harga tiket pesawat yang tinggi, yang menjadi kendala bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi NTB. Selain itu, pengelolaan destinasi wisata yang belum sepenuhnya optimal, terutama dari segi infrastruktur dan kebersihan, juga menjadi isu penting. Beberapa destinasi di NTB memerlukan perbaikan fasilitas untuk memenuhi standar internasional agar lebih kompetitif. Penanganan ini menjadi prioritas agar wisatawan dapat menikmati pengalaman berkunjung yang lebih baik dan berkesan.



Promosi wisata yang lebih inovatif dan penggunaan teknologi digital juga turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Program pemasaran melalui media sosial dan platform digital berhasil menjangkau segmen wisatawan milenial dan generasi Z, yang cenderung mencari pengalaman wisata unik dan otentik. Selain itu, kerjasama dengan agen perjalanan internasional membantu memperluas pasar wisatawan mancanegara, khususnya dari negara-negara di Asia Tenggara, Eropa, dan Australia

Ke depan, untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini, NTB perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan, pengembangan destinasi wisata baru, serta perbaikan aksesibilitas dan transportasi. Langkah-langkah strategis seperti penguatan promosi internasional, pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan peningkatan konektivitas antar-destinasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia

Kebijakan dan Strategi

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan bidang urusan pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi NTB menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase SDM Kepariwisataan Dengan Sertifikasi Kompetensi dan Bahasa Asing;
- b. Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Geosite Geopark Sebagai Lokasi Pengembangan Green Economy dan Destinasi Eco Tourism, Produktifitas, lapangan usaha ekonomi sector penyediaan akomodasi dan makan minum, dan Persentase Desa Wisata yang Berprestasi National dan International;
- c. Meningkatnya Pemasaran Pariwisata yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Menginap dan Angka kunjungan wisatawan



Sasaran utama pembangunan bidang pariwisata yang telah digariskan dalam adalah meningkatnya daya saing pariwisata dengan indikator pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan akomodasi dan makan minum). Sasaran utama tersebut diwujudkan melalui program prioritas pembangunan bidang kepariwisataan yang diarahkan pada terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan program unggulan pariwisata andalan yang terdiri dari: 1.Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika, 2.Penataan 3 Gili KLU dan Pulau – pulau Kecil, 3.Wisata Halal dan Sehat, 4.Penataan 99 Desa Wisata, 5.Geopark – Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora, 6.Kawasan Samota, 7.Revitalisasi Islamic Center.

Program unggulan pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersebut diatas merupakan program prioritas daerah yang bertujuan untuk mewujudkan daya saing pariwisata yang dapat diandalkan dengan menggunakan strategi yakni pengembangan kawasan dan destinasi strategis termasuk didalamnya penguatan desa wisata untuk memperkuat koneksi antar kawasan dan destinasi. Adapun kawasan strategis pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : KSPD Mataram Metro, KSPD Senggigi-Tiga Gili, KSPD Kuta Mandalika, KSPD Alasutan, KSPD Pototano-Malu, KSPD Batu Hijau-Dodorinti, KSPD SAMOTA, KSPD Hu'u, KSPD Teluk Bima dan KSPD Waworada.

Pengembangan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. KEK Mandalika diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.40T dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 587.000 tenaga kerja hingga tahun 2025 (TBC). Pengembangan KEK Mandalika semakin diperkuat dengan ditetapkannya Mandalika sebagai salah satu dari 5 DPSP yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prioritas pengembangan pariwisata Indonesia. KEK Mandalika sebagai DPSP memiliki keunggulan daya tarik dengan dibangunnya Mandalika International Street Circuit di dalam kawasan yang dihajatkan untuk pelaksanaan MotoGP, WSBK dan ajang balap internasional lainnya dengan masa kontrak kurang lebih 10 tahun.



Strategi pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTB dilakukan melalui : Pengembangkan destinasi kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; Pengembangkan industri pariwisata yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Pengembangkan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan tata kelola destinasi yang nyaman dan aman, Pengembangkan promosi dengan menggunakan Tehnologi digital sebagai respon dari tolls pemasaran pariwisata *"Low Budget High Impact"*.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan tahun 2024 dengan melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan fasilitas pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi Nusa Tenggara Barat dan citra kawasan pariwisata daerah. Adapun even-even yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah:

NO	NAMA EVENT	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN
1	Porsche Sprint Challenge	Januari 2024	Pertamina Mandalika, Lombok Tengah
2	Sedekah Ponan	11 Februari 2024	Moyo Hilir, Kabupatem Sumbawa
3	Festival Bau Nyale	16-17 Februari 2024	Pantai Seger, Lombok Tengah
4	Merumatta Coast Trail	24 Februari 2024	Pantai Senggigi, Lombok Barat



5	Pesona Khanza Ramadhan 2024 di NTB	18 Maret-5 April 2024	Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram
6	Festival Rimpu Mantika	27 April 2024	Lawata, Kota Bima
7	Lebaran Topat	29 April 2024	Lombok Barat
8	Rinjani 100	24-26 Mei 2024	Sembalun, Lombok Timur
9	L'etape Indonesia	26 Mei 2024	Mandalika, Lombok Tengah
10	Asia Road Racing Championship	26 Mei 2024	Mandalika, Lombok Tengah
11	MXGP Samota	30 Juni 2024	Sirkuit Samota, Sumbawa
12	Sykarara Begawai Jelo Nyesek	Juli 2024	Lombok Tengah
13	Festival Melala	6 Juli 2024	Kabupaten Sumbawa
14	MXGP Lombok	7 Juli 2024	Sirkuit Eks Bandara Selaparang
15	Alunan Budaya Pringgasela	12-20 Juli 2024	Desa Pringgasela, Lombok Timur
16	Festival Lakey	25-28 Juli 2024	Kabupaten Dompu
17	Shell Eco Marathon	26 Juli 2024	Sirkuit Mandalika
18	Sail Boat Race	25 Agustus 2024	Pantai Elak-elak, Lombok Barat
20	Lombok Sumbawa Tenun Festival	September 2024	Kota Mataram
21	Ballona Festival	1-15 September 2024	Pantai Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat
22	Perang Topat	19 September 2024	Lingsar, Lombok Barat
23	MotoGP Mandalika	27-29 September 2024	Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah
24	Lombok Sumbawa Fair	27-29 September 2024	Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah
25	Senggigi Sunset Jazz	29 September 2024	Pantai Kerandangan, Lombok Barat



26	Pacoa Jara	Oktober 2024	Kabupaten Dompu
27	Alunan Budaya Pengadangan	16 Oktober 2024	Lombok Timur
28	Festival Perang Topat	19 November 2024	Pura Lingsar, Lombok Barat
29	Peosna Pantai Karakat	Desember 2024	Lombok Timur
30	Festival Budaya Maloka	Desember 2024	Lombok Timur
31	Maulid Adat Bayan	Desember 2024	Lombok Utara
32	Lombok Syariah Festival		

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Dalam perda ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. destinasi Pariwisata; b.industri Pariwisata; c.pemasaran Pariwisata; d.kelembagaan Pariwisata; e.penciptaan Ekosistem Investasi yang Kondusif; f.partisipasi masyarakat; dan g. pembiayaan.

Adanya pengembangan KEK Mandalika memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 60 persen untuk tenaga kerja lokal dan 40 persen untuk tenaga kerja non lokal dan asing. Terlebih lagi pada bulan September tahun 2024 dilaksanakan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan tenaga kerja di sector-sektor pariwisata baik didalam maupun diluar kawasan KEK Mandalika. Mandalika menjadi magnet pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang diharapkan memberikan dampak penguatan destinasi, peningkatan angka kunjungan wisatawan, penggunaan tenaga kerja serta pengembangan daya tarik pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-Pulau Kecil, Penataan 99



Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &Tambora, Revitalisasi Islamic Centre), Program Pemasaran Pariwisata (Termasuk: Wisata Halal&Sehat), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota).



Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum	persen	79,94	75.54	Dinas Pekerjaan Umum
9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Bongkar)	Dinas Perhubungan	Kapal	9.181.776	4.239.934,57	Dinas Perhubungan
9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Muat)	Dinas Perhubungan	Kapal	3.570.360	1.289.744	Dinas Perhubungan
9.1.2.[a]	Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan	Unit	5	5	Dinas Perhubungan
9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	5	5	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	BPS	Persen	4.47	4.42	Dinas Perindustrian
9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan	BPS	Persen	12,37	4,19	Dinas Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	BPS	Persen		10,17	Dinas Perindustrian
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile	Survei Angkatan Kerja Nasional (BPS)	Persen	8,02	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika

Keadaan dan Kecendrungan

Provinsi NTB pada tahun 2024 memiliki Unit Usaha sebanyak 123.006, mengalami peningkatan sebesar 2,00% dari tahun 2023. Seiring dengan meningkatnya unit usaha, terjadi pula peningkatan jumlah tenaga kerja dari 388.256 orang pada tahun 2023 menjadi 391.423 orang pada tahun 2024 dengan penambahan sejumlah 3.167 orang atau persentase peningkatan sebesar 0,81%. Nilai investasi pada tahun 2023 sebanyak Rp20.527.261.265 meningkat sebesar 0,03% menjadi Rp20.534.140.628 di tahun 2024



Gambaran kondisi iptek dan inovasi di Provinsi NTB yang menjadi pendorong untuk menjaga, mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang dapat dilihat dari indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Inovasi Daerah, dan indikator terkait lainnya.

Rasio PDRB Industri Pengolahan

No	Tahun	Nilai Tambah Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	PDRB Provinsi (Miliar Rupiah)	Rasio PDRB Industri Pengolahan(%)
1	2020	4,351.6	93,288.9	4.66
2	2021	4,442.9	95,437.9	4.66
3	2022	4,530.8	102,073.7	4.44
4	2023*	4,644.5	103,906.2	4.47
5	2024**	4,839.2	109,415.0	4.42

Sumber: BPS, 2025

Industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, ditandai dengan peningkatan nilai tambah dari Rp4.351,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp4.839,2 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya geliat sektor industri, khususnya pada subsektor kecil dan menengah yang mulai mengembangkan produk olahan lokal berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB secara keseluruhan, laju peningkatan industri pengolahan masih tergolong lambat. Rasio kontribusi sektor ini terhadap PDRB justru mengalami penurunan, dari 4,66 persen pada tahun 2020 dan 2021 menjadi hanya 4,42 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa sektor industri pengolahan belum tumbuh secepat sektor-sektor lain seperti pertambangan, pariwisata, dan pertanian.



Penurunan kontribusi relatif ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam mendorong hilirisasi industri, terutama yang berbasis sumber daya lokal. Optimalisasi kawasan industri, pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta penguatan rantai pasok merupakan strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan NTB.

Ke depan, peran industri pengolahan harus diperkuat sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah, dengan mendorong keterkaitan antar sektor (agroindustri, perikanan, peternakan) agar mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, serta meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi NTB secara berkelanjutan.

Tantangan dan Pembelajaran

Prioritas pembangunan sektor industri berbasis pada pengembangan potensi lokal yang ada di NTB. Hal ini dihajatkan sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat NTB. hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada subsektor perindustrian Sejalan dengan hal tersebut, internalisasi kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor industri prioritas untuk menuju Making Indonesia 4.0 dengan tetap mengedepankan pengembangan skala industri berbasis potensi lokal. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri pengolahan berkorelasi dengan kebijakan strategis Kabupaten/Kota untuk secara bersama mengembangkan skala industri berbasis potensi lokal serta pengembangan mass Production and mass Promotion.

Peran dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi NTB dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing industri; meningkatkan kualifikasi IKM; dan meningkatkan pertumbuhan IKM. Peningkatan kualifikasi IKM merupakan upaya mendorong industri kecil yang telah tumbuh untuk menaikkan skala usaha industri menjadi skala industri menengah.



Secara umum, dari sudut pandang manajerial, isu strategis dalam sektor perindustrian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kompetensi dan Kreativitas IKM yang Belum Kompetitif
2. Belum Adanya Standarisasi Desain dan Kualitas Produk
3. Belum Adanya Kawasan Industri sebagai Penyangga Bahan Baku yang Terkoordinir
4. Masih Rendahnya Penggunaan Mesin dan Alat-alat Otomatisasi
5. Keterbatasan Akses Pembiayaan
6. Kurangnya Dukungan Infrastruktur
7. Keterbatasan Akses Pasar
8. Regulasi yang Tidak Mendukung.

Pembelajaran:

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi penganguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkar destinasi. Adapun tantangan yang dihadapi adalah: a. Kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis masih rendah. b. Desain dan packaging kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar. c. Peluang pembiayaan IKM yang masih lemah karena belum memenuhi standar kelayakan kredit pembiayaan perbankan. d. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.(termasuk packaging produk). e. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional. f. Masih rendahnya penggunaan sarana prasarana mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah melalui Peningkatan Kapasitas dengan Mengadakan pelatihan dan workshop tentang desain produk, inovasi, manajemen produksi, dan pemasaran bagi pelaku IKM. Melalui:

1. Pendampingan yaitu Memberikan pendampingan teknis dan manajerial secara berkelanjutan kepada IKM, termasuk dalam hal



pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, dan akses pasar. 2. Kemitraan: Mendorong kemitraan antara IKM dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau perusahaan besar untuk transfer pengetahuan dan teknologi. 3. Pengembangan Standar: Pemerintah dan asosiasi industri perlu berperan aktif dalam mengembangkan standar kualitas produk IKM, baik standar nasional maupun internasional. 4. Sertifikasi: Mendorong IKM untuk mendapatkan sertifikasi produk yang relevan, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) atau sertifikasi halal. 5. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran pelaku IKM tentang pentingnya standar kualitas dan sertifikasi produk

Pengembangan Kawasan Industri: Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan rantai pasokan bahan baku. Kawasan industri ini dapat menjadi pusat produksi dan distribusi bahan baku bagi IKM. Melalui 1. Koperasi dan Klaster: Mendorong pembentukan koperasi atau klaster industri di mana IKM dapat bekerjasama dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran produk. 2. Kemudahan Akses Informasi: Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang pemasok bahan baku, harga, dan ketersediaan 3. Insentif Fiskal: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti keringanan pajak atau subsidi bunga, bagi IKM yang berinvestasi dalam teknologi produksi. 4. Transfer Teknologi: Memfasilitasi transfer teknologi dari perusahaan besar atau negara maju kepada IKM. 5. Pelatihan Operator: Melatih tenaga kerja IKM dalam penggunaan dan pemeliharaan mesin-mesin produksi modern.

Program Pembiayaan Khusus: Pemerintah perlu mengembangkan program pembiayaan khusus untuk IKM, dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah. 1. Penjaminan Kredit: Pemerintah dapat memberikan penjaminan kredit bagi IKM yang ingin mengajukan pinjaman ke bank Literasi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan pelaku IKM agar mereka lebih memahami tentang pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan. 2. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi sentra IKM. 3. Kemitraan Swasta:



Pemerintah dapat menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh IKM.

Pemasaran Bersama: Mendorong IKM untuk bergabung dalam kelompok atau klaster untuk melakukan pemasaran bersama melalui 1. E-commerce: Memfasilitasi IKM untuk memanfaatkan platform e commerce untuk memasarkan produk mereka secara online. 2. Pameran dan Festival: Mengadakan pameran dan festival produk IKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

Simplifikasi Regulasi: Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi yang terkait dengan IKM, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Melalui **Pelayanan Terpadu Satu Pintu:** Pemerintah dapat membuka pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah IKM dalam mengurus perizinan dan persyaratan lainnya.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Serangkaian kegiatan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan di bidang perindustrian. Kegiatan kegiatan tersebut meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan Industri:
 - a. Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah.
 - b. Identifikasi potensi dan peluang investasi di sektor industri.
 - c. Penyusunan studi kelayakan proyek-proyek industri prioritas.
 - d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan pembangunan industri.
2. Evaluasi Hasil Pembangunan:
 - a. Pengumpulan data dan informasi terkait perkembangan industri.
 - b. Analisis capaian target-target pembangunan industri.
 - c. Identifikasi kendala dan hambatan dalam pembangunan industri.
 - d. Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program pembangunan industri.

3. Pengawasan Terhadap Industri dan Perusahaan:

- a. Pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan di bidang industri.
- b. Inspeksi terhadap fasilitas produksi dan lingkungan industri.
- c. Pembinaan dan pendampingan kepada perusahaan dalam meningkatkan daya saing.
- d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang industri.

4. Pendataan Informasi Industri:

- a. Pengumpulan data dan informasi tentang perusahaan industri, jenis produk, kapasitas produksi, tenaga kerja, dan lain-lain.
- b. Pengelolaan basis data industri yang terintegrasi.
- c. Penyediaan informasi industri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, pelaku industri, dan pemerintah.

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri di daerah. Secara khusus, diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri.
2. Menciptakan lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan nilai tambah produk industri.
4. Meningkatkan daya saing industri daerah.
5. Mendorong pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi.
6. Mewujudkan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Dalam mendorong untuk meningkatkan jumlah industri di Provinsi NTB, dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan UKM, dimana dinas perindustrian sebagai lokomotif terbentuk dan berkembangnya di sektor Industri, baik Industri olahan maupun industri permesinan.



Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

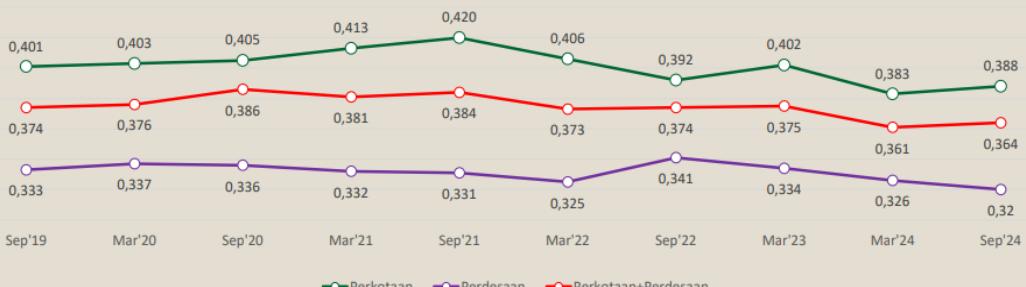
Program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 % dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	persen	0,375	0,364	Semua OPD
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	persen	13,82	11,91	Semua OPD
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Kementerian Desa	Desa	4	0	DPMPD Dukcapil
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Kementerian Desa	Desa	153	252	DPMPD Dukcapil
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.						
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS	persen	14,88	13,79	DPMPD Dukcapil
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Aspek	BPS	persen	64,49	NA	Kesbangpoldagri

Keadaan dan Kecendrungan

Perkembangan Gini Ratio, September 2019-September 2024





Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,364. Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361 dan menurun 0,011 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,375. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,388; naik dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383 dan turun dibanding gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,402. Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,320; turun dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,326 dan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,04 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,70 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah

Berdasarkan kriteria World Bank tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori: ketimpangan tinggi jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) antara 12-17 persen, ketimpangan rendah jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di atas 17 persen..

Tantangan dan Pembelajaran

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori:



ketimpangan tinggi jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) antara 12-17 persen, ketimpangan rendah jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di atas 17 persen. NTB pada September 2022 Kelompok Penduduk sebesar 40 porsen Berpengeluaran Rendah sebesar 18,30. Kelompok Penduduk 40 porsen Berpengeluaran Menengah sebesar 36,56 dan Kelompok penduduk 20 porsen Berpengeluaran Tinggi sebesar 45,14 sehingga tingkat ketimpangan NTB berada pada ketimpangan rendah.

Daerah	Periode	Kelompok Penduduk		
		40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	Maret 2023	17,21	34,97	47,82
	Maret 2024	18,31	35,20	46,49
	September 2024	18,04	35,32	46,65
Perdesaan	Maret 2023	19,91	38,59	41,50
	Maret 2024	20,26	38,71	41,03
	September 2024	20,70	38,79	40,51
Perkotaan + Perdesaan	Maret 2023	18,34	36,31	45,36
	Maret 2024	19,11	36,62	44,27
	September 2024	19,04	36,45	44,51

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,364. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361 dan

menurun 0,011 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,375. Gini Ratio di daerah perkotaan pada september 2024 tercatat sebesar 0,388, naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,402. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,320, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,326 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,334.

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga ada upaya yang sistimatis untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB, disamping itu juga Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) harus selalu



diperbaharui sehingga sasaran penanggulangan bisa tepat. Untuk mengkondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan pada tahun 2024. Salah satu fokusnya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ada juga kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk mengurangi beban finansial mereka dan meningkatkan akses transportasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah NTB diantaranya adalah :

1. Penyaluran KUR dan UMi:

Bank BRI menjadi penyalur utama KUR dan UMi di NTB, dengan penyaluran miliaran rupiah kepada ribuan debitur. Sektor yang paling banyak menerima KUR dan UMi adalah Industri Pengolahan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Jasa Kesehatan

2. Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Penyandang Disabilitas:

Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan modifikasi milik penyandang disabilitas dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka.

3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:

Program SKALA mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal, termasuk peningkatan kualitas belanja daerah, tata kelola program, dan dukungan pengembangan rencana bisnis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



4. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah:

Program SKALA juga fokus pada peningkatan kualitas belanja daerah, termasuk perhitungan biaya satuan untuk kegiatan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan identifikasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memastikan penyediaan layanan dasar kepada kelompok rentan

5. Pengembangan Energi Hijau:

Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengembangan Energi Hijau mendorong penggunaan energi hijau yang berkelanjutan, mandiri, ramah lingkungan, dan adil. Ini sejalan dengan visi NTB untuk menjadi provinsi yang mandiri energi dan ramah lingkungan.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar:

Program SKALA juga mendukung penyusunan Standar Harga Satuan untuk tahun 2025, yang mencakup biaya layanan dasar yang inklusif untuk penyandang disabilitas



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pengunggungawab
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh..						
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	persen	66,31	67,74	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Presentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLHK	persen	45,43	NA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Percentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DLHK	persen		64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLHK	Desa	90,21	93,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas						
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS	persen	0,017	0,08	Kepolisian

Keadaan dan Kecendrungan

Rumah menjadi jendela untuk melihat kualitas hidup masyarakat. BPS menerbitkan Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023, yang menunjukkan 36,85% Rumah Tangga di Indonesia tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. 36-37 rumah dari setiap 100 rumah tangga hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak huni. Rumah sehat berkontribusi untuk mencapai Tujuan 11 SDGs 2030 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Hunian Layak memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space) (2) memiliki akses terhadap air minum layak (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak (4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.



Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Provinsi NTB mencapai 66,31% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 67,74% pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dengan penyediaan perumahan, yaitu penyediaan rumah susun di kawasan perkotaan dan kawasan kumuh dan pemberian bantuan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten. Untuk mempermudah informasi kondisi perumahan di NTB diperlukan sistem informasi manajemen secara online dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Perumahan. Sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 Poin d, Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui kondisi perumahan secara pasti serta proses pengajuan usulan bantuan dapat efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sasaran bantuan tepat sasaran. Penyelenggaraan Sistem Informasi ini perlu didukung oleh semua pihak baik Pemerintah maupun para pelaku pembangunan serta masyarakat, sehingga Sistem Informasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni.



Tantangan terbesar dalam program Destana di NTB yang sudah berjalan selama ini, terutama terletak di (i) Lemahnya pembinaan Destana oleh instansi atau organisasi yang membentuknya. Destana hanya sampai tahapan pembentukan saja tanpa disertai proses pendampingan dan advokasi kebijakan di level desa untuk menjamin keberlanjutan Destana; (ii) Sinergisitas dan koordinasi antar instansi ataupun organisasi dalam pembentukan Destana, terlihat adanya lebih dari satu instansi/organisasi yang membentuk Destana di 1 desa yang sama; (iii) Belum adanya penilaian ketangguhan Destana yang sudah terbentuk; (iv) Kurangnya inovasi dan pelibatan unsur Akademisi dan Dunia Usaha dalam implementasi Destana, pembentukan Destana apabila mengacu pada 6 komponen Destana sesungguhnya bisa dikerjakan secara parsial melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas dan Program tanggung jawab social Perusahaan/Dunia Usaha; dan (v) Pembentukan Destana kadang mengabaikan ketangguhan Desa yang telah terbentuk melalui kearifan local dan modal sosial di desa.

Adapun Tantangan yang harus di selesaikan oleh Provinsi NTB adalah: Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten/kota se NTB. Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana masih kurang memadai. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan perumahan Provinsi NTB pada dokumen RPJP dan RPJMD Provinsi NTB, adalah menyediakan hunian yang layak huni bagi masyarakat yang dilengkapi dengan ketersediaan PSU yang memadai. Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung



atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten.

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Penanganan RLTH diantaranya melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota di NTB, pemanfaatan anggaran DBH-CHT, intervensi pembiayaan dari APBN, Dana Desa hingga penanganan rumah tak layak huni oleh Baznas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat salah satu program teknis yaitu Program Penanggulangan Bencana yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi NTB ke dalam tiga kegiatan serta beberapa sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2024 yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh bencana antara iain: 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender dalam program. 2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin. 3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan. 4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat. 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran



masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan kerentanan warga. 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana. 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana. 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko. 9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan. 10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjawab seluruh kegiatan di tingkat masyarakat

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB. Melalui program Sejuta Rumah ini seluruh kabupaten/kota dapat. Kalau tahun ini kan hanya tiga kabupaten saja yang dapat yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat

Pelaksanaan pembangunan desa tangguh bencana dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun mulai tahun 2011 hingga 2024 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non Govermen Organization (NGO). APBD bisa berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berasal dari perangkat daerah terkait seperti BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan NGO berasal dari Islamic Relief, Palang Merah Indonesia (PMI), PSP, Muslim Aid, Yayasan Skala, Konsepsi, Berugaq Desa, Samawa Center, World Relief, dan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER). Dalam hal pengurangan resiko bencana maka upaya yang dilakukan adalah dengan Pembinaan dan pelatihan personil teknis secara



proporsional, Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan memaksimalkan peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector serta Diseminasi Pengurangan Risiko Bencana dalam peningkatan fungsi lingkungan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program Destana, maka perlu dibentuk kelembagaan seperti forum Pengurangan Risiko Bencana dan atau Tim Siaga Bencana Desa. Kelembagaan ini adalah organisasi yang mengawal kebijakan dan penganggaran di tingkat desa untuk berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Pembentukan kelembagaan menjadi tolok ukur adanya keberlanjutan dari program Destana. Dalam menjamin keberlanjutan DESTANA, beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah: 1. Mendorong kelembagaan Relawan TSBD untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial desa dan memainkan peran strategis sebagai katalisator agenda PB dan PRB di level desa; 2. Pemanfaatan Bidang 5 dalam nomenklatur keuangan desa memberi ruang besar bagi penguatan dan keberlanjutan destana; 3. Pelibatan aktor kunci pembangunan desa mulai BPBD, Tim Pendamping Profesional, dan Tim Pendamping Desa menjadikan DESTANA sebagai model yang diinternalisasikan dalam agenda pembangunan desa.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali						
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	DLHK	persen	15,65	64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.a Mendukung negaranegara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.						
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang	Kementerian ESDM	Megawat	41,82	67,31	Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral

Keadaan dan Kecendrungan

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan sampah, antara lain pada terbatasnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) serta kelembagaan yang tidak berjalan sehingga banyak infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak berfungsi. Pada Tabel 8 dibawah ini dapat dilihat besaran persentase sampah yang berhasil terkelola dari tahun 2022 s/d 2024.

Indikator	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan Sampah (%)	54,98	65,31	74,15
Persentase Penanganan Sampah (%)	42,20	49,64	53,20
Persentase Pengurangan Sampah (%)	12,78	15,67	20,95

Berdasarkan data tahun 2024, timbulan sampah di seluruh kabupaten kota se – NTB yang terolah di fasilitas pengelahan sampah sebesar 64,25 persen atau 1.740 ton per hari dari total timbulan sampah 2.700 ton per hari atau 985.500 ton per tahun termasuk yang ditangani oleh TPAR kebon Kongok sebesar 350 ton per hari Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah sebesar 45 persen terutama di kota-kota.



Tantangan dan Pembelajaran

Upaya pengelolaan sampah dilaksanakan melalui program penanganan sampah dan pengurangan sampah. Kondisi pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di Provinsi NTB menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2025 – 2029 mencoba merencanakan akselerasi pencapaian target neraca pengelolaan sampah 2 (dua) tahun lebih maju dari target nasional yaitu 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan di tahun 2024. Terdapat beberapa permasalahan penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah. Permasalahan pembuangan limbah menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bending, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB adalah Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa, Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah, Skema pengurangan sampah berbasis desa, sedangkan saat ini Pemdes masih fokus BTT untuk stimulus ekonomi dan Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya reduce, reuse, recycle).

Tingginya persentase sampah yang tidak terkelola disebabkan karena NTB lebih banyak fokus pada kegiatan penanganan, utamanya pemrosesan akhir. Berdasarkan terminologi pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan di mulai dari pemilihan, pewadahan, pemindahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.



Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk penanganan, perlu untuk meningkatkan efektifitas pengurangan sampah di NTB. Kegiatan pengurangan adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencakup berbagai upaya untuk mengurangi, memanfaatkan, dan mengolah sampah, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan utama meliputi pengurangan sampah di sumber, penerapan kantor ramah lingkungan, revitalisasi gotong royong, pengelolaan sampah berbasis sekolah, serta pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Komitmen dan Kebijakan Pemerintah NTB:

1. Destinasi Bersih dan Nyaman

NTB berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata dengan pengelolaan sampah yang efektif.

2. Ekonomi Sirkuler

NTB berupaya mewujudkan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan nilai ekonomi sampah

3. Waste to Energy (WtE)

Mengolah sampah menjadi energi terbarukan menjadi fokus utama, dengan memanfaatkan limbah sampah sebagai bahan bakar co-firing.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sampah di NTB, termasuk kebijakan, strategi, dan kewenangan dalam pengelolaan sampah.

5. Pengelolaan Sampah Regional

Meliputi pemasaran, pengomposan, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi energi di TPA Regional.



6. Status Darurat Sampah

Penetapan status darurat sampah untuk memperkuat pengelolaan sampah di NTB

Kebijakan pengelolaan sampah di NTB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemanfaatan sampah menjadi energi, hingga pengembangan industri pengolahan sampah. Meskipun terdapat tantangan, NTB terus berupaya mencapai target Nol Sampah pada tahun 2050 melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian target pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 melibatkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yaitu Meningkatkan peran Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penerapan kebijakan pengurangan sampah di berbagai sector dengan Menerapkan kebijakan pengurangan sampah di berbagai sektor, termasuk tempat ibadah, perkantoran (Eco Office), dan kegiatan komersial dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Selain itu, NTB juga berfokus pada pengelolaan sampah berbasis lingkungan sekolah, revitalisasi gotong royong dalam pengelolaan sampah, serta pembentukan tim percepatan penanganan sampah.

Beberapa upaya spesifik yang dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi TPS 3R yaitu Meningkatkan peran Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
2. Kebijakan Pengurangan Sampah dengan Menerapkan kebijakan pengurangan sampah di berbagai sektor, termasuk tempat ibadah, perkantoran (Eco Office), dan kegiatan komersial.



3. Revitalisasi Gotong Royong dengan Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui gotong royong
4. Pengelolaan Berbasis Lingkungan Sekolah dengan Menerapkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan di sekolah-sekolah untuk menanamkan kebiasaan baik sejak dini.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dengan Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya.
6. Pengembangan Industri Pengolahan Sampah dengan Membangun industri pengolahan sampah untuk mengolah sampah yang telah dipilah, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
7. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas dengan Meningkatkan fasilitas dan armada pengangkutan sampah, serta melengkapi dengan teknologi pengelolaan sampah yang modern
8. Kerjasama dengan Berbagai Pihak dengan Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan, teknologi, dan pengetahuan.
9. Penyediaan Bank Sampah Induk Regional dengan Membentuk bank sampah induk regional di NTB untuk mengelola sampah yang terkumpul dari berbagai bank sampah unit.
10. Penanganan Sampah Laut dengan Melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di pantai dan laut, serta mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air dan sungai.



Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bencana alam di semua negara						
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana-strategi nasional penanggulangan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Nasional	persen	94,12	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,strategi dan perencanaan nasional						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	DLHK	ton	93.413,47	446.151,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	persen	0.86	4.08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	persen	97	85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim						
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK	Lembaga	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keadaan dan Kecendrungan

Dampak perubahan iklim dari sisi kenaikan suhu udara dan kenaikan permukaan air laut menjadi tantangan pembangunan daerah. Potensi kebencanaan dan kerugian ekonomi menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menggambarkan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terdampak bencana dan perubahan iklim. Kondisi ini dapat dilihat pada Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan indikator terkait lainnya.



No	Tahun	Emisi tahun t (ton CO2 eq)	PDRB ADHK (milliar rupiah)	Intensitas Emisi	Penurunan Intensitas Emisi
1	2020	380.695,81	93.269,13	4,08	85%
2	2021	498.545,31	95.437,86	5,22	81%
3	2022	192.608,09	102.074,07	1,89	93%
4	2023	93.413,47	108.523,89	0,86	97%
5	2024	446.151,00	109.415,00	4,08	85%

Sumber: Aksara Bappenas 2025 (diolah Bappeda)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Emisi GRK ini menggambarkan banyaknya pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, secara alami dan antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini berasal dari kegiatan yang dilaksanakan pada sektor prioritas pembangunan daerah. Sektor ini mencakup kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (karbon biru). Jumlah potensi penurunan emisi GRK merupakan besarnya potensi penurunan pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, yang dihitung dari emisi baseline dikurangi dengan emisi proyek. Persentase perubahan emisi GRK menggambarkan besarnya perubahan tingkat emisi GRK pada titik tahun tertentu dibandingkan dengan angka dasar emisi di tahun yang sama. Rasio potensi penurunan intensitas emisi GRK menjadi angka perbandingan antara total emisi GRK di tahun berkalan dengan PDB/PDRB di tahun berjalan. Nilai penurunan Intensitas emisi GRK bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai upaya untuk pengurangan emisi GRK



Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan penurunan emisi gas rumah kaca di NTB meliputi berbagai aspek, mulai dari sektor energi, pertanian, hingga pengelolaan limbah. Pembelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya komitmen seluruh daerah, inovasi teknologi, serta penerapan praktik berkelanjutan dalam berbagai sektor.

Tantangan:

1. Sektor Energi

Dominasi penggunaan energi fosil, terutama untuk transportasi dan kebutuhan industri, menjadi tantangan utama. Perlu ada transisi ke energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.

2. Sektor Pertanian

Pertanian, terutama persawahan, merupakan sumber emisi gas metana. Inovasi seperti penggunaan varietas padi rendah emisi dan teknologi pertanian cerdas iklim (CSA) perlu ditingkatkan.

3. Sektor Kehutanan

Deforestasi dan degradasi lahan dapat meningkatkan emisi. Perlindungan dan pemulihian hutan menjadi kunci.

4. Sektor Limbah

Pengelolaan limbah yang belum optimal, terutama limbah organik dan B3, juga berkontribusi pada emisi. Perlu ada peningkatan pengelolaan limbah yang lebih baik, termasuk pengolahan limbah organik dan pengurangan sampah.

5. Komitmen Daerah

Perlu ada komitmen kuat dari seluruh daerah di NTB untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk penyediaan anggaran dan kebijakan yang mendukung.



6. Inovasi Teknologi

Penerapan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti teknologi CSA di pertanian dan penggunaan energi terbarukan, masih perlu ditingkatkan.

Pembelajaran

1. Komitmen: Keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi.
2. Inovasi: Pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, seperti teknologi pertanian cerdas iklim, energi terbarukan, dan teknologi pengolahan limbah, sangat penting.
3. Pendekatan berkelanjutan : Penurunan emisi gas rumah kaca harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
4. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim juga menjadi kunci.
5. Monitoring dan evaluasi: Pengukuran dan evaluasi rutin terhadap implementasi program penurunan emisi gas rumah kaca diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan.
6. Kerjaama lintas sector: Kolaborasi antara berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, energi, dan limbah, diperlukan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.



Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil berbagai kebijakan dan strategi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Upaya ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai target pembangunan berkelanjutan Kebijakan dan Strategi Utama: Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK ,NTB memiliki Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. Pembentukan Gugus Tugas GRK: Gugus tugas ini dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RAD GRK, dengan tiga pokja yang fokus pada lahan (pertanian, kehutanan, perkebunan). Pengembangan Energi Terbarukan: NTB menargetkan 100 persen energi terbarukan, didukung dengan penyusunan kebijakan dan regulasi teknis, penguatan infrastruktur, dan pembentukan tim koordinasi. Mitigasi di Sektor Pertanian: Petani NTB menerapkan teknologi mitigasi GRK, seperti pengairan berselang, penggunaan bahan organik, dan varietas padi rendah emisi metana, menghasilkan penurunan emisi rata-rata 37 persen. Pengelolaan Pesisir Rendah Emisi: Program NTB Hijau dan Blue Carbon Consortium (BCC) berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir yang rendah emisi. Pengendalian Perubahan Lahan: Strategi mencakup pengurangan laju perubahan lahan, peningkatan penyerapan CO₂ melalui reboisasi dan konservasi lahan, serta peningkatan nilai NPV (Net Present Value) pada penggunaan lahan. Peningkatan Efisiensi Energi: Mengurangi penggunaan energi listrik, mengubah penggunaan pupuk kimia menjadi organik, dan mengolah limbah peternakan untuk mengurangi emisi. Mobilisasi pembiayaan memanfaatkan APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan kerjasama internasional untuk mendukung implementasi program.



NTB turut mendorong target pengurangan emisi karbon nasional yang telah disepakati dalam Paris Agreement, yaitu 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Untuk itu, paling tidak terdapat tujuh program pembangunan lingkungan di NTB yaitu NTB Zero Waste, NTB Hijau, Mencapai IKLH, Hutan Tanaman Energi, Waste To Energy, Net Zero Emission, dan Ekonomi Hijau. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan berkestahanan iklim dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama, salah satunya dari mitra pembangunan. Pemerintah Daerah NTB telah mengeluarkan banyak kebijakan, antara lain Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Selanjutnya Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2018 tentang RAD SDGs Tahun 2019 – 2023. Ada juga Peraturan Gubernur Tahun 2019 Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. "NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTB.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Ekonomi Hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam ujarnya. Sementara itu terkait pengembangan Hutan Tanaman Energi, program ini akan dilaksanakan di Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di wilayah Balai KPH di NTB. Dengan jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan cepat seperti lamtoro, komoditi ini akan mensubstitusi batubara sebagai bahan bakar. Berkolaborasi dengan PLN, kegiatan ini akan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Telah di susun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD-API menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta *pelaku* usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Pena nggungawab
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke Tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya						
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ton	244.727	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.						
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	143.710,91	182.968,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yg berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	persen	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Keadaan dan Kecendrungan

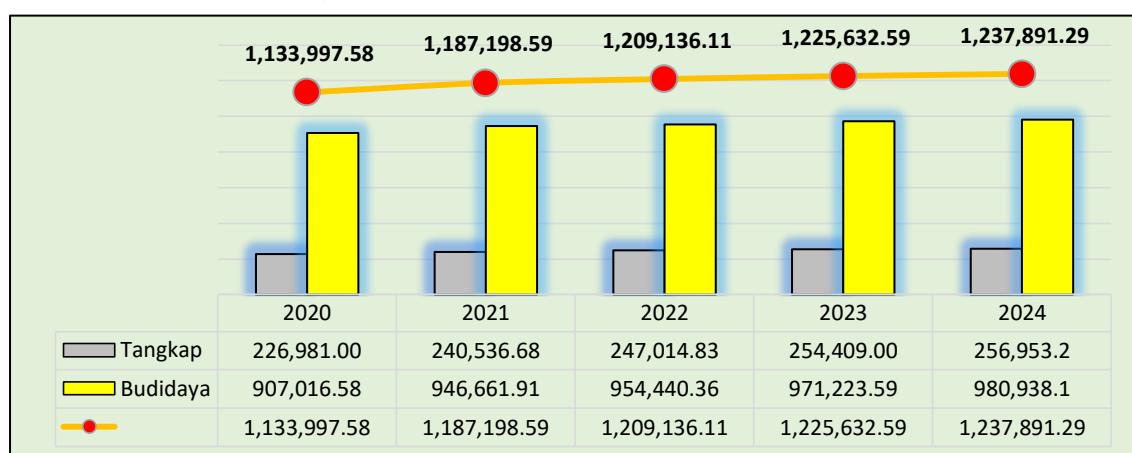
Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya bagi wilayah kepulauan dan pesisir seperti Nusa Tenggara Barat. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah, baik perikanan tangkap maupun budidaya, memberikan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi ekonomi biru yang berkelanjutan. Program-program prioritas diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyediaan sarana prasarana perikanan, peningkatan kualitas SDM kelautan, modernisasi armada tangkap, serta penguatan tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat trend pertumbuhan yang positif dan konsisten selama lima tahun terakhir. Dari sisi volume, produksi perikanan NTB terus tumbuh dari 1,13 juta ton pada tahun 2020 menjadi 1,23 juta ton pada 2024. Lebih dari 75% produksi berasal dari perikanan budidaya, dengan komoditas unggulan seperti rumput laut, udang, dan ikan laut budidaya. Wilayah produksi utama meliputi Sumbawa, Bima, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Dompu. Untuk perikanan tangkap, peningkatan hasil ditunjang oleh sumber daya tuna, tongkol, cakalang, dan gurita dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan 573. Capaian ini menempatkan NTB sebagai produsen udang terbesar nasional dan produsen rumput laut kelima setelah Sulsel, Sulteng, NTT, dan Kalimantan Utara.

Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2020- 2024



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

Dalam subsektor perikanan tangkap, komoditas unggulan yang mendominasi produksi antara lain adalah tuna, cakalang, dan tongkol. Perairan Samudera Hindia di selatan NTB dan Selat Lombok di bagian barat menjadi habitat utama ikan-ikan pelagis besar dan kecil ini. Produksi perikanan tangkap terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas armada, penyediaan sarana penangkapan yang modern, serta perbaikan tata kelola pelabuhan perikanan.



Sementara itu, subsektor perikanan budidaya memberikan kontribusi signifikan melalui komoditas unggulan seperti rumput laut, udang, lobster, dan kerapu. Budidaya rumput laut menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat pesisir di wilayah seperti Bima, Dompu, dan Lombok Timur. Produksi rumput laut NTB tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga telah menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara Asia dan Eropa

Tantangan dan Pembelajaran

Provinsi NTB memiliki garis pantai sepanjang 2.333 km dan wilayah laut yang luas, menjadikannya salah satu provinsi dengan potensi perikanan yang sangat besar di Indonesia. Sesuai dengan RTRW Provinsi NTB tahun 2024-2044, kawasan perikanan tercatat seluas 2.388.501 Ha dan kawasan pergaraman 3.734 Ha. Kawasan perikanan ini memiliki ekosistem perairan yang beragam seperti laut, pesisir, tambak dan perairan umum (danau dan sungai) yang mendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Potensi sumber daya perikanan tangkap di perairan NTB diperkirakan mencapai 290.000 ton per tahun namun tingkat pemanfaatannya baru mencapai 83% dengan rata-rata 241 ribu ton selama 2019-2024. Kinerja produksi perikanan menunjukkan peningkatan 2,7% tiap tahunnya. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya diperkirakan dapat mencapai produksi sebesar 1,5 juta ton dan yang termanfaatkan baru rata-rata (2019-2024) sebesar 983 ribu ton atau 65%. Tidak seperti perikanan tangkap yang produksinya terus meningkat, jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan penurunan dari 1,1 juta ton di tahun 2019 menjadi 980 ribu ton di tahun 2024

Selanjutnya di sektor perikanan juga bergantung pada keberadaan infrastruktur yang mendukung, seperti pelabuhan perikanan, pasar ikan, fasilitas pendinginan dan pengolahan ikan serta jalur distribusi yang memadai. Di NTB, beberapa pelabuhan perikanan utama telah dikembangkan. Selain itu, keberadaan cold storage dan unit pengolahan ikan sangat penting dalam menjaga kualitas hasil perikanan agar tetap segar dan bernilai jual tinggi. Infrastruktur jalan dan transportasi yang baik juga mendukung distribusi hasil perikanan ke pasar lokal maupun nasional



Pengelolaan ekosistem lautan sangat ditentukan sejauh mana komitmen semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam di laut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pola pemanfaatan lestari yang senantiasa memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang. Pola pelestarian atau dikenal dengan istilah konservasi pada sebagian perairan laut tentu akan menimbulkan pro dan kontra antar pihak yang berkepentingan. Misalnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha merasa dibatasi menggunakan ruang laut. Namun sebaliknya pemerintah berhak melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan laut guna memastikan tidak terjadi over eksploitasi yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga pada suatu saat perairan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dapat menjadi kawasan Bank Ikan yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlangsungan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan dan Strategi

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTB salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan lautan. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun untuk memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif



dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

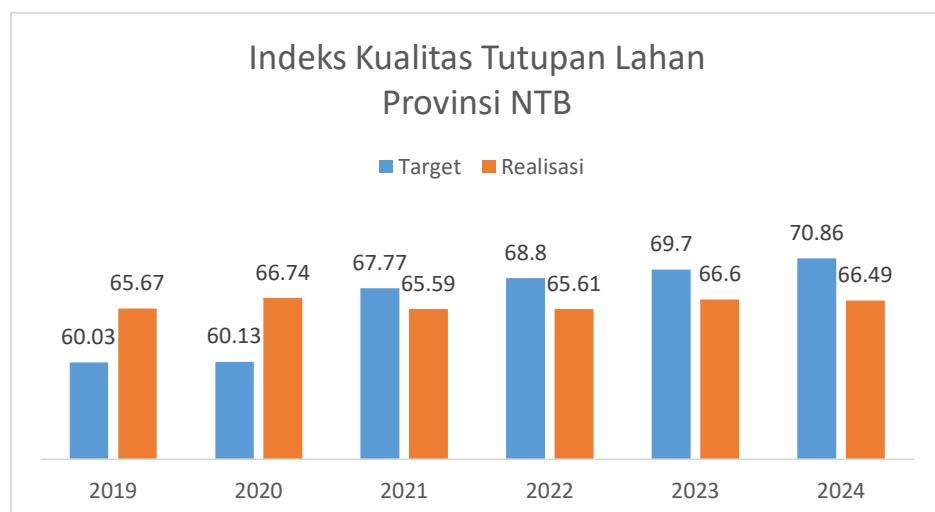
Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, terbitnya peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2020 tentang kemitraan kawasan konservasi perairan. Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah. Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah: a. mewujudkan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah secara teratur, tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada kawasan konservasi perairan daerah; b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelautan, jasa lingkungan dan ekosistemnya secara berkelanjutan; c. memaksimalkan manfaat ekonomi dan ekologis atas sumberdaya ekosistem pada kawasan konservasi perairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. mengoptimalkan pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan daerah; e. mendorong peningkatan kemitraan pelaku usaha dan pihak lain dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah; dan f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan. Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah berlaku pada wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan; dan b. kawasan konservasi perairan daerah yang telah dicadangkan



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional						
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan.	KLHK	persen	43,58	2,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	KLHK	Ha	493.292		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keadaan dan Kecendrungan



Indeks kualitas tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, mencapai nilai 66,49 poin untuk tahun 2024. Nilai ini mencapai target yang telah dicanangkan yaitu 65,56 poin. Perhitungan IKTL yang dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan metode perhitungan yang telah menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25 persen (0,6 dari tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).



Rehabilitasi dan penghijauan serta penyediaan bibit berkualitas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan hutan rakyat dan bibit produktif yang secara keseluruhan seluas 80 hektar. Sementara perlindungan hutan dengan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Operasi pengamanan hutan dilaksanakan dengan melibatkan para pihak seperti aparat desa, TNI/Polri untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang mengembangkan inisiatif Provinsi Hijau, diperlukan analisis yang utuh terhadap semua komponen permasalahan yang terkait dengan degradasi hutan, lahan dan lingkungan. Sehingga elaborasi komprehensip dari masing-masing faktor pengungkit/penyebab permasalahan tersebut dapat dirumuskan alternative pengurangan dampak dan solusi penanganan melalui intervensi program pembangunan baik yang bersifat governmental driven inisiatif maupun kontribusi dan entitas eksternal pemerintah. Formulasi intervensi ini tentunya harus mendapat dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, masyarakat, mitra pembangunan dan swasta. Untuk mendukung hal tersebut, skema insentif fiskal perlu dikembangkan sebagai bentuk pembiayaan/anggaran yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB. Masih dijumpai terjadinya illegal logging dan pengalihan fungsi



lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk menekan tindak pidana kehutanan tersebut Dinas LHK melakukan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar.

Kebijakan dan Strategi

Upaya perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Operasi pengamanan hutan dilaksanakan dengan melibatkan para pihak seperti aparat desa, TNI/Polri untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Dari sisi legalitas, Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat mengatasi kondisi darurat illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran kayu ilegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Selain instruksi Gubernur, pengelolaan hutan NTB telah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis



karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) menjamin kelestarian fungsi hutan

nencegah kerusakan kawasan

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburnya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Pada tahun 2023, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilaksanakan melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 6.489,27 hektar dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Jenis kegiatannya antara lain meliputi rehabilitasi vegetatif, kebun bibit rakyat, persemaian permanen, bibit produktif, serta rehabilitasi dari perorangan, organisasi, pelajar/mahasiswa, BUMN, swasta dan hibah.

Upaya pengamanan hutan dan mempertahankan tutupan lahan baik yang dilakukan oleh tenaga pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan pada Dinas LHK dan UPT Kementerian LHK yang ada di wilayah Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 880 orang tenaga kehutanan yang diasumsikan mampu mempertahankan wilayah 500 ha per orangnya, sehingga luasan kawasan hutan yang terlindungi ialah seluas 440.000 ha atau 41 persen dari luas kawasan hutan keseluruhan.

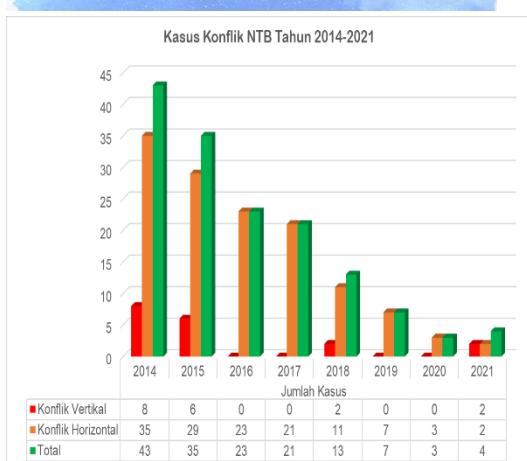
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kepolisian	persen	1,5	1,4	Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kepolisian	orang	5.466.688	5.666.314	Kepolisian
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksplorasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	persen	67,17	NA	Kepolisian
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.						
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	Kasus	5.796	7.546	Kepolisian
16.7 Menjamin pengambilan Keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	KPU	Persen	NA	10,77	Dinas pemberdayaan perempuan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	persen	17,02	11	Dinas Pemberdayaan perempuan
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Menkopol hukam, BPS, BAPPEN AS	Persen	64.46	NA	Kesbangpoldagri
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan		Persen	64.49	68,83	Kesbangpoldagri
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan		Persen	79.26	NA	Kesbangpoldagri
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran						
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS Susenas	Persen	86.3	87,10	DPMPD Dukcapil



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS Susenas	Persen	89,29	90,46	DPMPD Dukcapil
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan menurut umur.	BPS	Persen	78,43	81,10	DPMPD Dukcapil

Keadaan dan Kecendrungan



Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud pluralisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa sektor ekonomi

menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.



Jumlah konflik sosial adalah indikator yang dapat mencerminkan situasi dan kondisi keamanan di daerah. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Provinsi NTB dalam 3 tahun terakhir berhasil menurunkan angka konflik sosial, dari 7 kasus pada tahun 2019 menjadi 3 kasus pada tahun 2020 dan 4 kasus pada tahun 2021.

Indeks kriminalitas dipengaruhi oleh seberapa banyak kasus kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan kesusaiaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik dengan kekerasan, kejahatan terhadap barang/hak milik tanpa kekerasan dan kekerasan narkotika. NTB menargetkan pada Tahun 2022 adalah 14,05 dengan capaian yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 13,25. Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimpikasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap



Adapun untuk keterwakilan perempuan NTB menduduki keterwakilan terendah di Indonesia, dengan prosentase perwakilan hanya 1,54% pada tahun 2019 atau berdasarkan hasil perolehan suara calon legislatif perempuan pada pemilu 2019. Pada Tahun 2014-2109 perwakilan jumlah perempuan sebagai anggota berjumlah 6 orang.

Tantangan dan Pembelajaran

Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu juga belum dibuatnya peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga ada pengendalian dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak merugikan masyarakat lainnya.

Hasil Pemilihan Legislatif 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari daftar calon tetap (DCT) sebanyak 914 orang, 563 diantaranya laki-laki dan 351 perempuan atau sebanyak 38,40%. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB disebabkan stigma masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki, sistem dan struktur sosial patriarki dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan, serta faktor logistik calon legislatif perempuan sebagai modal utama maju dalam kontestasi masihlah belum mencukupi kebutuhan biaya politik.

Kebijakan dan Strategi

Melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. Selanjutnya BPSDM dalam RPJMD Tahun 2019-2023 menetapkan program pendukung utama untuk pencapaian Sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM dengan indikator Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN.



Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Daerah NTB untuk melindungi anak dari berbagai macam kekerasan yang terjadi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditegakkan adalah dengan penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya lain untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik adalah: Mengoptimalkan peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, Melakukan koordinasi yang intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi.

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Capaian 2024	Pelaksana/Penanggungjawab
Target 17.1: Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	0.92	1,17	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	1.32	NA	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	40.48	29,94	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
Target 17.3: Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDRB.	BNP2TKI, BI	US\$	31.419,95	76.238,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Target 17.8 : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS: Susenas	persen	63,2	85.02	Dinas Komunikasi dan informatika

Keadaan dan Kecendrungan

Rasio Pajak merupakan salah satu matrik yang digunakan untuk mengukur perekonomian. Dimana rasio pajak adalah perbandingan antara pendapatan pajak dan nilai total barang serta jasa yang dihasilkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pajak adalah kondisi ekonomi, kepatuhan masyarakat membayar pajak dan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi rasio pajak semakin baik kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, rasio pajak menurut DJPB menargetkan pada level 3 Persen, sedangkan angka untuk rasio pajak NTB berada pada level 1 dan kurang dari 2 berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rasio Pajak terhadap PDRB di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan meningkat. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah



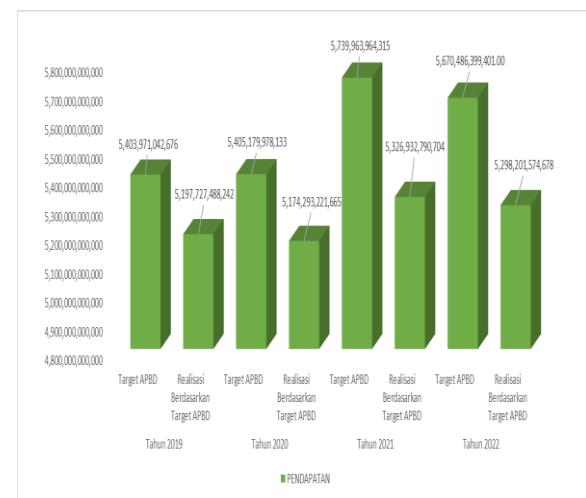
daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota.

Tren kenaikan Rasio Pajak terhadap PDRB di NTB mencerminkan penguatan kemandirian fiskal daerah. Artinya, semakin besar proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, semakin kuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berbasis potensi lokal.

Walaupun Rasio Pajak terhadap PDRB NTB menunjukkan tren positif, capaian saat ini yang masih di bawah target nasional yang umumnya ditetapkan dalam kisaran minimal 2 persen terhadap PDRB sebagai standar ideal kontribusi fiskal dari penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi. Mengindikasikan perlunya percepatan reformasi fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah agar kontribusi pajak terhadap PDRB semakin meningkat. Hal ini penting untuk mewujudkan NTB yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berdikari dalam pembiayaan pembangunan.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020-2024 ini penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, dimana sebagian besar asset dan potensi penerimaan PAD mengalami penurunan yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak dapat optimal seperti yang direncanakan. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 menurun sampai dengan 21,31% dari periode yang sama tahun 2020 akibat menurunnya deviden hampir semua BUMD.





Kebijakan dan Strategi

Program pendukung untuk mencapai indikator ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Melakukan dengan peningkatan kualitas layanan yang inovatif dan modern, yaitu e-Pendapatan (sudah termasuk e- Samsat dan Samsat Delivery) yang dihajatkan untuk mendekatkan pelayanan Bappenda kepada masyarakat wajib pajak, sekaligus untuk menunjang optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. diantara layanan pembayaran pajak daerah (e-Samsat), layanan jemput antar pembayaran PKB (Samsat Delivery), serta layanan penyetoran retribusi daerah (e-STS Retribusi). Untuk itulah Bappenda Provinsi NTB mengintegrasikannya ke dalam aplikasi e-Pendapatan merupakan program digitalisasi pendapatan daerah yang mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) guna menghasilkan pengelolaan pendapatan yang akurat, kuat, responsif, efektif dan efisien.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan yang dilakukan adalah; Menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan music dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.



BAB III

PEMBELAJARAN TPB/SDGS

Tujuan Dalam SDGs	: Tujuan 5 Kesetaraan Gender
Nama Instansi	: Yayasan Plan Internationaal Indonesia (YPII)
Nama Program	: GEMA CITA (Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lombok Barat
Waktu Kegiatan	: Januari 2022 – Desember 2024

Proses

Secara umum, GEMA CITA dirancang untuk berkontribusi terhadap pengurangan angka perkawinan anak dan kehamilan remaja, melalui intervensi holistik yang mencakup edukasi, penguatan kapasitas kepada anak dan remaja di komunitas dan sekolah, menginisiasi terbentuknya dan memperkuat kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta advokasi kebijakan dalam menciptakan lingkungan pendukung pencegahan perkawinan anak. Lebih khusus, GEMA CITA menyasar:





- a. peningkatan pemahaman anak dan remaja mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSР) serta risiko perkawinan anak dan kehamilan remaja penguatan kapasitas anak dan remaja, terutama perempuan, untuk dapat mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
- b. advokasi pembentukan dan perbaikan regulasi, Rencana Aksi Daerah (RAD), serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus perkawinan anak.
- c. penguatan kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak .



Penekanan pada edukasi melalui Sekolah Ramah Anak (SRA), Peer Educator (PE), dan Forum Anak dapat memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan yang tepat .Penguatan tata kelola di tingkat kabupaten/desa dan pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor

untuk menangani isu perkawinan anak. Upaya pencegahan kehamilan remaja, peningkatan akses dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Penekanan pada edukasi melalui Sekolah Ramah Anak (SRA), Peer Educator (PE), dan Forum Anak dapat memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan yang tepat.Penguatan tata kelola di tingkat kabupaten/desa dan pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menangani isu perkawinan anak. Upaya pencegahan kehamilan remaja, peningkatan akses dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Gema cita menargetkan 5000 penerima manfaat langsung remaja (13-24 tahun, 60% perempuan) di 10 sekolah di Lombok Barat, Sukabumi, dan Nagekeo, serta 1000 penerima manfaat langsung dewasa, termasuk tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, tokoh agama, profesional. Selain itu, 20.000 penerima manfaat tidak langsung



dan 324.000 orang terjangkau melalui platform digital.

Pada tahap awal, 376 pendidik sebaya di 13 sekolah dilatih dan difasilitasi untuk menyebarkan informasi mengenai HKSR, risiko perkawinan anak, dan kehamilan remaja melalui diskusi kelompok. Gema Cita juga mendukung advokasi Forum Anak sebagai wadah aspirasi remaja dan memperkuat mekanisme pelaporan kasus di sekolah dan desa melalui koordinasi PATBM, SRA, dan pemangku kepentingan lainnya.



Gema Cita mendorong keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terkait HKSR. Di Lombok Barat, inovasi dilakukan melalui Sahabat Pengadilan, kemitraan dengan Pengadilan Agama Giri Menang. Sahabat Pengadilan, yang terdiri dari pendidik sebaya, memberikan edukasi kepada keluarga pengusul dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan anak. Selain itu, hakim Pengadilan Agama Giri Menang mendapatkan pelatihan khusus agar prinsip kepentingan terbaik anak diintegrasikan dalam proses peradilan.

Pelaksanaan Kegiatan

- Meningkatkan kapasitas anak muda
- Partisipasi aktif anak muda dalam program
- Pembuatan modul HKSR dan pelatihan
- Memperkuat peer educator
- Penguatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
- Membuat mekanisme alur pelaporan perlindungan anak, termasuk alur pelaaporan jika diketemukan potential perkawinan anak
- Pendampingan sekolah ramah anak
- Event sharing praktik baik
- Membuat policy brief oleh anak muda
- Anak muda berpartisipasi dalam penyusunan praktik baik.
- Produksi dan distribusi media KIE lingkungan



Hasil dan Dampak



Gema Cita meningkatkan kesadaran HKSR dan risiko perkawinan anak bagi 5.418 remaja 13–24 tahun. Agensi meningkat signifikan, dengan keputusan tepat atas kesehatan reproduksi naik dari 20,40 persen menjadi 54,80% dan keberanian menantang sikap negatif dari 20,40 persen menjadi 81,50 persen.

Pendampingan pendidik sebaya dan Sahabat Pengadilan mengubah norma budaya, menciptakan komunitas yang mendukung perlindungan anak. Dukungan masyarakat terhadap hak remaja menentukan pernikahan meningkat dari 4 persen menjadi 60 persen, serta dukungan PATBM, SRA, dan forum anak dari 34 persen menjadi 95 persen.

Peluang dan Reflikasi

Penguatan kapasitas anak dan kaum muda melalui pelatihan pencegahan perkawinan anak (HKSR, kesetaraan gender, advokasi, regulasi, riset) melahirkan champion yang mengedukasi teman sebaya dan mengkampanyekan



pencegahan perkawinan anak. Pendekatan peer-to-peer efektif meningkatkan kesadaran serta mencegah perkawinan anak.

Pembangunan lingkungan



pendukung dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan RAD, dan alokasi anggaran daerah. Pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Barat dapat menjadi model replikasi di NTB.

Inisiatif Sahabat Pengadilan bersama PA Giri Menang memastikan pendekatan yang berpihak pada anak. Dengan dukungan Mahkamah Agung dan Kemenko PMK, model ini berpotensi direplikasi di pengadilan lainnya



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan pencapaian target – target indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB adalah dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergitas program/kegiatan yang mendukung capaian indikator agar tepat sasaran dapat dicapai dengan komitmen pimpinan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi NTB Tahun 2024 ini merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan pencapaian target indikator SDGs sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut serta dapat dijadikan untuk pembelajaran kedepan termasuk diharapkan sebagai acuan juga untuk lahirnya inovasi-inovasi dalam mempercepat capaian target SDGs pada tahun-tahun berikutnya terutama untuk pencapaian agenda SDGs sampai dengan tahun 2030.



DAFTAR PUSTAKA

1. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Maret 2024
2. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 7 Februari 2024
3. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2024
4. Laporan akhir dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2024
5. Laporan akhir dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2024
6. Laporan akhir dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024
7. Laporan akhir dinas Perdagangan Provinsi NTB tahun 2024
8. Laporan akhir Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2024
9. Laporan akhir dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2024
10. Laporan akhir dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2024
11. Laporan akhir dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024
12. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTB tahun 2024
13. Laporan akhir dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2024
14. Laporan akhir dinas Sosial Provinsi NTB tahun 2024
15. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB tahun 2024
16. Laporan akhir dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2024
17. Laporan akhir dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2024
18. Laporan akhir Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2024
19. Laporan akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2024
20. Laporan akhir Inspektorat Provinsi NTB tahun 2024



21. Laporan akhir Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB tahun 2024
22. Laporan akhir dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB tahun 2024
23. Laporan akhir dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTB tahun 2024
24. Laporan akhir dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2024
25. Laporan akhir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tahun 2024
26. Laporan akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB tahun 2024
27. Laporan akhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024
28. Laporan akhir Sekertariat Daerah Provinsi NTB tahun 2024
29. Laporan Bank Indonesia Provinsi NTB tahun 2024

Lampiran :
Program Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana			
			Target	Realisasi						
INDIKATOR SDGs	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP: \$ 1,9 per hari)								
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur								
PROGRAM 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
Kegiatan 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Padi di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	1.758.537	14.424.610,00	1.453.408,00	32.530.000	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
Kegiatan 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	1.732.880	2.174.653,00	1.636.497,00	42.441.346	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	20.011	259.747,00	8.770,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
Kegiatan 3. Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Bawang di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB	Ton	212.618	213.468,00	159.885,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
		Ton	83.914	259.747,00	115.940,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	Ton	18.081	21.476,00	11.340,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Kegiatan 4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Kopi setiap tahun	Ton	6.428,86	6.090,89	6.423,36	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Jumlah Produksi Kakao setiap tahun	Ton		2.596,59	2.589,40	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Jumlah Produksi jambu Mete setiap tahun	Ton		11.446,82	9.812,38	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Jumlah Produksi Kelapa setiap tahun	Ton		50.138,97	49.809,25	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Jumlah Produksi Tembakau setiap tahun			54.694,85	77.344,93	41.221.791.000,-	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Pengembangan ternak unggas (bibit)		Kelompok	0	19	7	644.097.500	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kandang unggas		Kelompok	25	5	3	528.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pakan Unggas		Kelompok	3	2	-	18.900.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Pengadaan ternak Sapi	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	51	76	66	8.104.543.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	22	21	12	512.518.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok		3	3		DBHCHT	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kandang	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	6	9	5	714.368.404	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan Roda Tiga	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok		2	2	77.737.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)		Kelompok		6	6	58.213.080	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai	Jumlah Konsumsi Pangan per kapita /Tahun	Paket	116.264.500	174.900.000	172.060.000	174.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
angka kecukupan gizi melalui media provinsi							
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
Kegiatan 1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	orang	100.000.000	1.127.918.000	1.124.544.000	1.127.918.000	APBD Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	140.000.000	109.000.000	98.704.100	109.000.000	APBD Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
Kegiatan 1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi	32	207,010,000	205,537,390	665.000.000	APBD Dinas Perdagangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	37	180.008.000	179.265.500	632.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Kegiatan 4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	0	75.000.000	74.893.080	35.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
PROGRAM 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		sentra		11,548,793,500.00	11,211,892,623.00	336,900,877.00	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 7. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	14.500.000	2	2	14.500.000	APBD	Dinas Pariwista



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Lokasi	6.91.498.500	2	2	6.910.498.500	APBD	Dinas Pariwista
PROGRAM 8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan apasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	72.411.000	50	50	72.411.000	APBD	Dinas Pariwisata
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	orang	57.010.000	50	50	57.010.000	APBD	Dinas Pariwisata
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
Kegiatan 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	RTS	165.464.000	100	88	411.370.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang terlayani							
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton	2.178.957.843	238.703	233.077,21	2.611.429.750	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk: Budidaya Lobster, KRPL/P2L)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Ton	8.034.716.100	690.633	632.856	175.697.800	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit		3	3			Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan	Ton		13.500.000	15.150.000	5.131.889.980	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat pesisir yang Ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	3.338.340.368	6	14	3.311.925.150	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 13. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT)								



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	Sekolah		15	15	28,776,100	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 14. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen		90	51,31	6,460,064,240	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar		488	488	731,453,884	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 16. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	Kelompok		21	21	200,250,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Paket	3.519.000.000	83.12	84.41	24.836.524.080	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 18. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	persen	3.698.621	100	100		Dinas Kesehatan	
PROGRAM 19. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	Jiwa	3.815.766.500	335	335	3,628,882,730	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 20. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Jiwa					Dinas Sosial	
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial kelompok	Jiwa		699	699	2.208.249.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Jiwa		607	507	9,271,601,650	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 21. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		396		1.213.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 22. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	orang		2800		550.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang		1000		200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang		24.453		575.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 23. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	11	11	11	2.005.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten								
PROGRAM 24. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
Kegiatan 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK		15		357.500.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM 25. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pendidikan SMA	Percentase Angka Drop OUT (DO) SMA	Persen		27	12	242.385.362.035	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan SMK	Percentase Angka Drop OUT DO SMK	persen		61	23	223.848235.354	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Percentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	persen		6,81	8,94	1.744.070.100	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 26. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Diklat yang meningkat kapasitas SDM nya	UKM		155	155	382.220.400	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	Jumlah UKM yang di evaluasi menjadi start up	UKM		250	50	217.809.108	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya	Koperasi		40	60	1.526.978.720	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 28. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat Produksi dan Keuangannya	UKM		514	514	7.557.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	usaha		50	50	50.000.000	APBD	Dinas Pariwista
PROGRAM 29. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan	unit		175	175	4.876.665.000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki							
PROGRAM 30. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Kegiatan 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit		10	10	121,250,000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
PROGRAM 31. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Kegiatan 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman	paket			1637	471,158,013,999	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K						
PROGRAM 32. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	orang		2800		550.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang		1000		200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang		24.453		575.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 33. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan		1	1	2.005.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 34. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	50	407	1.115	1.195.365.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
INDIKATOR SDGs	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Air minum)						
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Penyehatan Dasar)						
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Sanitasi)						
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe						
PROGRAM 35. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Kegiatan 1 Pelaksanaan Komunikasi Informasi	Persentase Puskesmas yang	persen	10	114	114		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih & Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Prov	dibina PHBS						
Kegiatan 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah UKBM Aktif	UKBM	7605	7605	APBD	Dinas Kesehatan	
INDIKATOR SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang					
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana					
PROGRAM 36. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
Kegiatan 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Percentase Wilayah Kab/Kota Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Kebencanaan	persen	100	100	130.946.400	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Percentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	persen	100	100	2.023.149.020	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Percentase Kejadian Bencana yang tertangani	persen	100	100	916.257.769	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	persen	100	100	100	230.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 37. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	persen	100	100	100	111.700.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)						
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan						
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.000 Kkal/Kapita/Hari						
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari						
	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe						
PROGRAM 1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Dokumen	1	2	2	174.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Percentasi Penduduk Rentan Rawan Pangan yang Difasilitasi	persen	0.21	2,55	1,19	1.127.918.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 3. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Kegiatan1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diawasi	persen	100	100	100	109.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita						
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	Percentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang	persen	100	100	100		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	dilayani						
Kegiatan 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Kematian ibu dengan penurunan kasus 10% Per tahun	kasus	79	82		APBD	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kasus Kematian bayi dengan penurunan kasus 5% Per tahun	kasus	711	742		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persen	100	68,94		APBD	Dinas Kesehatan
	persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	persen	100	77,9		APBD	Dinas Kesehatan
	persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	persen	100	77,92		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Standar	persen	100	80,1		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	86,79		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai	persen	100	94,96		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
	standar						
	Jumlah Bayi yang mendapatkan pelayanan pengukuran dan penimbangan berat badan sesuai standar	persen		0,85	91,44		APBD Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)					
	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan)					
PROGRAM 5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
Kegiatan 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Percentase ketersediaan benih tanaman	Persen	91.17	100	102.98	500.000.200	APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
Kegiatan 1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	persen	N/A	60	100	7.596.447.200	APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	persen	N/A	70	100		APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Percentase Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya	persen	N/A	18	100		APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih					
PROGRAM 1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas			177	708.030.000	APBD
							Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria					
	3.3.3.*	Kejadian Malaria per 1.000 orang					
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta					
	3.3.5.*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.					
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi					
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun					
PROGRAM 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 persen	Kabupaten/Kota	10	10	10	489.069.160	APBD
Kegiatan 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas	177	177	177	128.560.180	



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	10	10	10	49.740.000	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 4: Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit	Unit				3.113.703.287	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%		Puskesmas : 81,92 RS : 73,3	Puskesmas : 81,92 RS : 73,3	20.297.300	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis						
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi						
PROGRAM 6. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas		9	39.688.596	APBD	Dinas Kesehatan	
	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)						
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)						
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.						
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK						
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT						
	3.b.1*	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan						
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan						
	3.b.3*	Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota						



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 9. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%			Puskesmas : 81,92 RS : 73,3	Puskesmas : 81,92 RS : 73,3	20.297.300	APBD	Dinas Kesehatan

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	4.1.1	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika						
PROGRAM 1. Program Pengelolaan Pendidikan								
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah gedung baru SMA	Unit	0	0	0	0	APBD	
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah gedung baru SMK	unit	0	0	0	0	APBD	
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat						
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun						
PROGRAM 2. Program Pengelolaan Pendidikan								
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang	49	32	32	20.351.093.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang	30	17	17	7.365.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)						
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)						



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 5. Program Pengelolaan Pendidikan								
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang	30	17	17	7.365.000.000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
INDIKATOR SDGs :	4.c.1*	Percentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik						
PROGRAM 9. PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAAN								
Kegiatan 1. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi S1/DIV	orang	0	0	0	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	orang	0	0	0	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Dokumen Data guru dan tenaga kependidikan Profesi	Dok	7815	9261	100	25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	Orang	0	0	0	0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 5. Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Jumlah Pengawas yang dinilai	orang	131	131	100	125.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon kepala sekolah yang bersertifikat	orang	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen penilaian Angka Kredit Jafung	Dok	1345	1520	100	75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 8. Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah calon kepala sekolah SMA, SMK dan PK-PLK yang mengikuti bimtek	orang	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 9. Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah Guru yang mengikuti	orang	1000	1100	100	225.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 10. Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Jumlah Guru tidak tetap (GTT) dan Pengawai TU tidak tetap	orang		GTT = 7917 PTT = 3145	100	42.274.160.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 11.Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Workshop Sistem kendali pendidikan kinerja	orang	50	73	100	115.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 12. Olimpiade Sains Guru	Jumlah Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	orang	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.						
PROGRAM 1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	365	237	338	111.895.896.97	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang dilatih/bintek	orang	30	30	30	485.114.904.09	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Kegiatan 3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	orang	500	500		137.954.747.01	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota						
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah: DPRD						
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
Kegiatan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG	OPD		46	46	210.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina	organisasi		60	60	550.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
INDIKATOR SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (a) kelompok WUS						
	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (b) kelompok PUS						



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	orang	0	85	NA	207.096.217.80	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Percentase Keluarga Balita dan Anak yang ikut BKB	orang	0	85	NA	186.075.204.29	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
INDIKATOR SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 5 tahun						
	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 0 tahun						

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak)						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Air minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Air Minum	persen	3,12	81,34	84,41	24,570,515,881	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Sub Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten/Kota		5	6	13,634,509,890	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Sub kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen		2	2	1,151,185,340	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	Jumlah Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/detik		100	100	9,784,820,651	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
PROGRAM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Proin	Jumlah kawasan strategis/prioritas Provinsi yang terlayani akses dan prasarana pendukung kesehatan	Kawasan	NA	5	5	28,176,267,523	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Sub Kegiatan: Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/detik	25	25	28,176,267,523	APBD	Permukiman)	
INDIKATOR SDGs	6.2.1*	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air						
	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak						
PROGRAM 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	persen	85,11	80,01	86,8	2,742,443,432	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota		3	4	2,525,612,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen		3	2	216,831,432	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Proinsi	Jumlah kawasan strategis/prioritas Provinsi yang terlayani akses dan prasarana pendukung kesehatan	Kawasan	NA	5	5	328,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septic dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	30	30	328,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
PROGRAM 3. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga	Dokumen	1	1	4.004.999.770	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)					
INDIKATOR SDGs	6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)					
PROGRAM 4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)					APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	120.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 5. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	Daerah Aliran Sungai	32	32	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 6. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	5	74.435.700	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	7.1.1*	Rasio Elektifikasi						
	7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	umlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku	Izin		25	25	230.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2. Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (RTS)	RTS		195	195	7.500.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs	7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga						
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku	izin		1	1	282.376.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub kegiatan: Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam Wilayah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan dan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah Provinsi	Dokumen	1	1		APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Kegiatan: Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan	Dokumen	1	1		APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Dokumen	1	1		APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	8.1.1.[a]	PDRB per kapita						
	8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita						
PROGRAM 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Padi di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	6.513.845.000	14.424.610,00	1.453.408,00	32.530.000	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	75.250.000	2.174.653,00	1.636.497,00	42.441.346	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton		259.747,00	8.770,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Bawang di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB	Ton	705.000.000	213.468,00	159.885,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Ton		259.747,00	115.940,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Ton		21.476,00	11.340,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Kopi setiap tahun	Ton	4.852.326.200	6.090,89	6.423,36		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
	Jumlah Produksi Kakao setiap tahun	Ton	2.596,59	2.589,40		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi jambu Mete setiap tahun	Ton	11.446,82	9.812,38		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Kelapa setiap tahun	Ton	50.138,97	49.809,25		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tembakau setiap tahun		54.694,85	77.344,93	41.221.791.000.-	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan ternak unggas (bibit)		Kelompok	19	7	644.097.500	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kandang unggas		Kelompok	5	3	528.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pakan Unggas		Kelompok	-	-	-	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



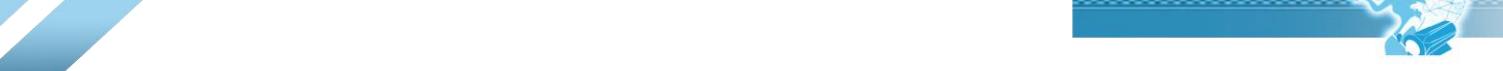
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Pengadaan ternak Sapi	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	76	66	8.104.543.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	21	12	512.518.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	3	3		DBHCHT	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kandang	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	9	5	714.368.404	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan Roda Tiga	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	2	2	77.737.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)		Kelompok	6	6	58.213.080	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Konsumsi Pangan per kapita /Tahun	Paket	116.264.500	174.900.000	172.060.000	174.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	orang	100.000.000	1.127.918.000	1.124.544.000	1.127.918.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	140.000.000	109.000.000	98.704.100	109.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
Kegiatan 1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi		207,010,000	205,537,390	665.000.000	APBD	Dinas Perdagangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1	632.000.000	APBD	Dinas Perdagangan	
Kegiatan 4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/Kota	10	10	35.000.000	APBD	Dinas Perdagangan	
PROGRAM 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		sentra		11,548,793,500.00	11,211,892,623.00	336,900,877.00	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 7. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang		50	50	100.000.000	APBD	Dinas Pariwista
Kegiatan 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi	orang		90	90	185.000.000	APBD	Dinas Pariwista



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
yang Dikembangkan							
PROGRAM 8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan apasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang			72.411.000	APBD	Dinas Pariwisata
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	orang	-	-	57.010.000	APBD	Dinas Pariwisata
ROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
Kegiatan 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang terlayani	RTS			411.370.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton		238.703	233.077,21	2.611.429.750	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk: Budidaya Lobster, KRPL/P2L)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton		690.633	632.856	175.697.800	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit		3	3			
Kegiatan 2. Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan	Ton		13.500.000	15.150.000	5.131.889.980	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat pesisir yang Ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok		6	14	3.311.925.150	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 13. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT)								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	Sekolah		15	15	28.776,100	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 14. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen		90	51,31	6,460,064,240	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar		488	488	731,453,884	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 16. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	Kelompok		21	21	200,250,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Paket	3.519.000.000	83.12	84.41	24.836.524.080	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 18. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Percentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	persen		100	100			Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 19. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	Jiwa	3.815.766.500	335	335	3,628,882,730	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 20. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)							Dinas Sosial
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial elompok	Jiwa		699	699	2.208.249.000	APBD	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Jiwa		607	507	9,271,601,650	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 21. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		396		1.213.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 22. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	orang	2800		550.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang	1000		200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	24.453		575.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 23. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	1	1	2.005.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 24. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Kegiatan 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	15		357.500.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 25. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pendidikan SMA	Percentase Angka Drop OUT (DO) SMA	Persen		27	12	242.385.362.035	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan SMK	Percentase Angka Drop OUT DO SMK	persen		61	23	223.848235.354	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Percentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	persen		6,81	8,94	1.744.070.100	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 26. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Diklat yang meningkat kapasitas SDM nya	UKM		155	155	382.220.400	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah UKM yang di evaluasi menjadi start up	UKM		250	50	217.809.108	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya	Koperasi		40	60	1.526.978.720	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
PROGRAM 28. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat Produksi dan Keuangannya	UKM		514	514	7.557.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	usaha		50	50	50.000.000	APBD	Dinas Pariwista
PROGRAM 29. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit		175	175	4,876,665,000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
PROGRAM 30. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Kegiatan 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit		10	10	121,250,000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 31. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Kegiatan 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman	paket			1637	471,158,013,999	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
INDIKATOR SDGs								
PROGRAM 2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan		35	35	24.999.800	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kegiatan 2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen		11	11	1.883.587.150	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs	8.3.1*	Proporsi kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin					
PROGRAM 3 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang di tempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Kegiatan		0	0	0	APBD
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan melalui job fair	Orang		1000	1000	60.000.000	APBD
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	Orang		180	180	550.000.000	APBD
Kegiatan 4. Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan Lokasi Kerja Dalam I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang		35	35	50.000.000	APBD
PROGRAM 4 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang		300	300	399.000.025	APBD
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Orang		5	5	14.999.750	APBD
Kegiatan 4. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja ditingkat daerah	Dokumen		1	1	5.943.700	APBD



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 5 : PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		314	334	823.309.286	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
INDIKATOR SDGs								
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja						
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka						
	8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran						
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)						
	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja						
PROGRAM 1. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.							
	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB.						
	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.						
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara						

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi						
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN								
Kegiatan1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	79,94	80,34	75,54	34,514,353,605	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km		230	230	5,365,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km		3,19	19,40	14,181,710,765	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan		1	1	6,645,828,422	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km		3.62	21.64	11,751,671,063	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
							Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)	
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	2	1,367,451,577	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)	
Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Km	1484.48	1349.54	562,326,778	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)	
Kegiatan:PenyelenggaraanJalan Provinsi	Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen	79.94	80.34	75,54*	17,440,145,150	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	275.922	308.435	17,440,145,150.00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)	



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Kegiatan 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	persen		56.35	56.35	11.258.523.000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan		18	18	2.549.376.100	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penilaian dan Rekomendasi Andalalin	Laporan		24	24	223.561.000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Infrastruktur Transportas	Laporan		10	10	245.319.400	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 5. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Dilakukan Pengembangan dan Pemeliharaan	unit		1	1	807.180.000	APBD	Dinas Perhubungan
	9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Bongkar)						
	9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Muat)						
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara						
	9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan penyeberangan						
PROGRAM 3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	Unit		5	5	36.442.000	APBD	Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Memenuhi Syarat Perizinan						
Kegiatan 2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	27	27	98.673.900	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyeawaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan pelabuhan, Penyeawaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	61	61	97.382.600	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	2	2.489.904.820	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs	9.2.1*	Rasio PDRB industry pengolahan dan nilai tambah industry pengolahan per kapita					



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan					
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industry pengolahan					
PROGRAM 4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi					2.906.545.000	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi					8.994.940.000	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					50.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
INDIKATOR SDGs	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile					

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

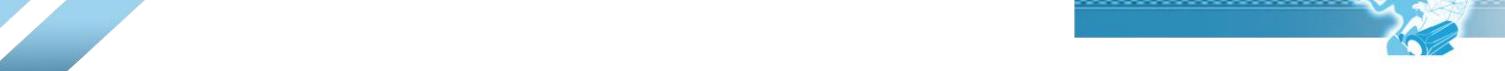
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	10.1.1*	Koefisien Gini						
	10.1.1.(a)	Percentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur						
PROGRAM 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Padi di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	6.513.845.000	14.424.610,00	1.453.408,00	32.530.000	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton	75.250.000	2.174.653,00	1.636.497,00	42.441.346	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten /Kota Se-NTB	Ton		259.747,00	8.770,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Bawang di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB	Ton	705.000.000	213.468,00	159.885,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Ton		259.747,00	115.940,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Ton		21.476,00	11.340,00		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Kopi setiap tahun	Ton	4.852.326.200	6.090,89	6.423,36		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Kakao setiap tahun	Ton		2.596,59	2.589,40		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	Jumlah Produksi jambu Mete setiap tahun	Ton		11.446,82	9.812,38		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Kelapa setiap tahun	Ton		50.138,97	49.809,25		APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tembakau setiap tahun			54.694,85	77.344,93	41.221.791.000.-	APBD dan APBN	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain						APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan ternak unggas (bibit)		Kelompok		19	7	644.097.500	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kandang unggas		Kelompok		5	3	528.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pakan Unggas		Kelompok		-	-	-	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengadaan ternak Sapi	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok		76	66	8.104.543.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
							Hewan	
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	21	12	512.518.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Pengadaan ternak Kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	3	3		DBHCHT	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Kandang	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	9	5	714.368.404	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Pengadaan Roda Tiga	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Kelompok	2	2	77.737.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Konsumsi Pangan per kapita /Tahun	Paket	116.264.500	174.900.000	172.060.000	174.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	orang	100.000.000	1.127.918.000	1.124.544.000	1.127.918.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	140.000.000	109.000.000	98.704.100	109.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
Kegiatan 1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi		207,010,000	205,537,390	665.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Kegiatan 2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		1	1	632.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Kegiatan 4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota		10	10	35.000.000	APBD	Dinas Perdagangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		sentra		11,548,793,500.00	11,211,892,623.00	336,900,877.00	APBD Dinas Perindustrian
PROGRAM 7. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang		50	50	100.000.000	APBD Dinas Pariwista
Kegiatan 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang		90	90	185.000.000	APBD Dinas Pariwista
PROGRAM 8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan apasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang				72.411.000	APBD Dinas Pariwisata
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan	orang		-	-	57.010.000	APBD Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjut								
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
Kegiatan 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang terlayani	RTS			411.370.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton		238.703	233.077,21	2.611.429.750	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk: Budidaya Lobster, KRPL/P2L)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Ton		690.633	632.856	175.697.800	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit		3	3		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan	Ton		13.500.000	15.150.000	5.131.889.980	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat pesisir yang Ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok		6	14	3.311.925.150	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 13. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT)								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	Sekolah		15	15	28,776,100	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 14. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen		90	51,31	6,460,064,240	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
Kegiatan1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar		488	488	731,453,884	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 16. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	Kelompok		21	21	200,250,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Paket		83.12	84.41	24.836.524.080	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM 18. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Percentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	persen		100	100			Dinas Kesehatan
PROGRAM 19. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	Jiwa		335	335	3,628,882,730	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 20. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)							Dinas Sosial
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial elompok	Jiwa		699	699	2.208.249.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Jiwa	607	507	9,271,601,650	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 21. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	396		1.213.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 22. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	orang	2800		550.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang	1000		200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	24.453		575.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 23. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	1	1	2.005.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 24. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK		15		357.500.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM 25. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pendidikan SMA	Persentase Angka Drop OUT (DO) SMA	Persen		27	12	242.385.362.035	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan SMK	Persentase Angka Drop OUT DO SMK	persen		61	23	223.848235.354	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	persen		6,81	8,94	1.744.070.100	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 26. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Diklat yang meningkat kapasitas SDM nya	UKM		155	155	382.220.400	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah UKM yang di evaluasi menjadi start up	UKM		250	50	217.809.108	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan dan	Jumlah Koperasi yang dikembangkan	Koperasi		40	60	1.526.978.720	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	usaha						dan Menengah	
PROGRAM 28. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat Produksi dan Keuangannya	UKM		514	514	7.557.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	usaha		50	50	50.000.000	APBD	Dinas Pariwista
PROGRAM 29. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit		175	175	4,876,665,000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
PROGRAM 30. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Kegiatan 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit		10	10	121,250,000	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 31. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Kegiatan 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman	paket			1637	471,158,013,999	APBD	Dinas Pemukiman Rakyat
INDIKATOR SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal						
	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri						
PROGRAM 1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang telah menyelenggarakan tata pemerintahan desa dengan baik	Desa	205	60	78.05	448.060.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
INDIKATOR SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas						
PROGRAM 1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							APBD	Dinas Sosial
Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu	Jiwa		400	400	590.000.000	APBD	Dinas Sosial
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang disabilitas yang tertangani	Jiwa		400	400	50.700.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Terlantar							
INDIKATOR SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan					
PROGRAM 1.							
							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						
PROGRAM 1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang tertangani	Unit	166	175	175	4.853.952.100	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	166	175	175	4.853.952.100	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman
PROGRAM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Kegiatan 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	Per센	100	100	100	1.373.130.089	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0	1	1	329.164.790		
Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	0	1	1	34.614.500		
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	5	5	724.567.559		
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	0	2	2	284.783.240		



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	11.6.1.(a)		Presentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya					
	11.6.1.(b)		Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah					
	11.6.2.(b)		Indeks Kualitas Udara					
PROGRAM 3. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (termasuk: NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPs Regional	Persentase Penanganan Sampah	Per센		60	49.02	5.067.219.508	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR SDGs	11.7.2.(a)		Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir					
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA								
Kegiatan : Penindak Tindak Pidana Umum	Jumlah Tindak Pidana Umum	Per센	1.5	1.4	1.4	76.848.295.709	APBN	Kepolisian

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (termasuk: NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPs Regional	Persentase Penanganan Sampah	Persen		60	49.02	5.067.219.508	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR SDGs	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang						
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								
Kegiatan 1. Penatausahaan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Jumlah izin	Izin		2	2	19.334.375	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi	Meningkatnya pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas	Dokumen		1	1	20.035.200	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kegiatan 3. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan dalam wilayah provinsi	Laporan		1	1	162.935.829	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

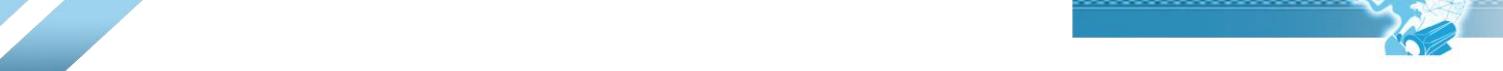


Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi	Dokumen	1	1	52.648.700	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana						
PROGRAM 1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Percentase Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Persen	100	100	100	2.047.100.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		1	1	170.500.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Desa		242	181	1.186.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		400	400	50.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Percentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	Persen	100	100	93.57	1.023.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan OPDB yang di Tetapkan Paling Lama 1 X 24 Jam berdasarkan hasil	Dokumen		2	2	68.267.100	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
	Dokumen Laporan Kaji Cepat						
Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	200	175	29.592.900	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik	Orang	10.000	10.000	925.140.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	Persen	100	100	230.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana melalui Jitupasna dan R3P	Dokumen	3	1	58.990.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan	Dokumen	7	9	122.125.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten/Kota	10	10	48.885.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
INDIKATOR SDGs	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun					
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)					
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)					



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
Kegiatan 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	Usaha/Kegiatan		30	30	100.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		5	5	50.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Kegiatan 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Unit Usaha		30	30	1,215,503,625	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		1	1	313,380,270	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor	Dokumen		1	1	101,854,200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Perubahan Iklim	lingkungan hidup yang Dilaksanakan						
Sub kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	800,269,155	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 2. enanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	Lokasi	3	3	60,415,950	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	60,415,950	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR SDGs	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup					
PROGRAM 3. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	Sekolah	15	15	264,917,060	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	164,917,060	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	orang	10	10	50,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Daerah Provinsi							Kehutanan
Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan Formal / lembaga masyarakat /komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	1	1	50,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuh	Ton		237.703	237.703	2.646.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	unit		10	10	344.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	unit		100	100	2.302.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	unit		1	1	14.276.750.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	unit		4	4	14.276.750.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan						
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	Ha		132.965,22	132.965,22	3.158.255.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		132.965,22	132.965,22	3.158.255.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Pusat							
Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	6	6	3.375.500.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	orang	30	30	3.375.500.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs	14.6.1.(a)	Percentase kepatuhan pelaku usaha.					
PROGRAM 3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Kegiatan 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	Pelaku Usaha	25	25	962.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	393.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	20.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	5	549.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.					

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan						
	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
Kegiatan 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	Km		9	9	8,300,503,647	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit		16	16	5,100,503,647	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit		16	16	3,200,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	Persen		100	100	750,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		23	23	750,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	Dokumen		17	17	3,244,670,928	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan roduski dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	737,984,782	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	737,984,782	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	7	7	739,811,396	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	7	7	70,136,802	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	7	7	70,136,802	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	7	7	444,308,182	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub Kegiatan: Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	7	7	444,308,182	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar	5.300	5.300	63,183,423,377	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	50,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	4.500	4.500	44,786,217,963	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	800	800	2,882,427,524	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	623	623	15,251,878,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	16	16	212,899,890	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	Per센	100	100	3.387.448.978	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	275.000	275.000	2,862,774,040	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub kegiatan: Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	10	10	165,000,088	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	10	171,588,450	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	5	188,086,400	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir						
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya						
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA								
Kegiatan : Penindak Tindak Pidana Umum	Jumlah Tindak Pidana Umum	Per센	1.5	1.4	1.4	76.848.295.709	APBN	Kepolisian
		Orang	5.466.688	5.666.314	5.666.314	76.848.295.709	APBN	Kepolisian
INDIKATOR SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir						
PROGRAM 1. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (BIDANG PHA)								
Kegiatan 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	lembaga		250	250	500.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	1	250.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Sub Kegiatan: Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan beeraan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	PD	46	46	250.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Dibina	Lembaga	5	5	250.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	3	3	250.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (BIDANG PKA)								
Kegiatan1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus		550	550	350.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	1	350.000.00	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan kegiatan penguatan dan pengembangan layanan	Lembaga		118	118	350.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Sub kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang		10	10	350.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INDIKATOR SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA								
Kegiatan : Penindak Tindak Pidana Umum	Jumlah Tindak Pidana Umum	Kasus	5.796	7.546	7.546	76,848,295,709	APBN	Kepolisian
INDIKATOR SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)						
PROGRAM 2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
Kegiatan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG	OPD		46	46	210.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan		1	1	60.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	1	1	150.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina	Organisasi	60	60	550.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/ media tingkat provinsi yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum,	Orang	250	250	350.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi							
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha / media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	lembaga	20	20	200.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
INDIKATOR SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi						
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan						
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan						
PROGRAM 3.								
							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
INDIKATOR SDGs	16.9.1.(a)	Percentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah						
	16.9.1.(b)	Percentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun						
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur						
PROGRAM 4. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
Kegiatan 1. penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Percentase blanko KTP-EI dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP	Persen		100	100	236.751.880	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
							Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Kegiatan: Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	10	10	236.751.880	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM 5. PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
Kegiatan 1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Percentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	17.996.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	17.996.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM 6. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
Kegiatan 1. penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang menyajikan data adminduk secara valid	Kabupaten/Kota	10	10	32.464.500	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
							Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Kegiatan: Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	32.142.500	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang rutin meng up-date data adminduk	Kabupaten/Kota	10	10	18.201.560	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	10	10	18.201.560	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB						
	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya						
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
Kegiatan1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	2,91	8,28	14,83	79.590.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub kegiatan: Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	2	2	79.590.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Kegiatan 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen	49.94	50,94	50,33	75.960.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	4	4	75.960.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	40.11	10.5	18.07	10.846.103.000,	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	12	4	4	541.850.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	2	2	279.220.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	864.960.000,	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	30	40	40	1.493.080.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	12	12	12	934.950.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
							Daerah	
Sub Kegiatan: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	286.470.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	12	12	1.903.660.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2	11	11	35.528.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	4	4	4	8.010.000,	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	2	12	12	1.087.395.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	3.094.960.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	2024		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	12	148.410.000,	APBD	Daerah Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	4	4	167.610.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
INDIKATOR SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB						
PROGRAM 3.								
								Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.						
PROGRAM 4.								
								Dinas Komunikasi dan Informasi

REKAPITULASI REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGRAN NON PEMERINTAH

Tujuan 1.Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP: \$ 1,9 per hari)							
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program									
Kegiatan 1. Kegiatan Microloan	Memberikan pinjaman kepada UMKN / pengusaha perempuan dalam skala kecil dengan	Desa	11	11	150.000.000	150.000.000	Global Micro Initiative German		Gema Alam
	Pemberdayaan ekonomi perempuan								
	Pendampingan manajemen keuangan dan bisnis								
Program									
Kegiatan.Perlindungan sosial	Mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis islam				14.574.525.000	14.574.525.000	Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah		YRII
Pelatihan peningkatan mata pencakharian									
Inklusi keuangan									
Pemberdayaan Sosial									
Membangun ekosistem ekonomi islam									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Program									
Membangun masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, dan meringankan penderitaan keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu		2024		4.498.000.000		IR UK dan Baznas Loteng & Lobar		YRII bersama Baznas
INDIKATOR SDGs									
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K							
INDIKATOR SDGs	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Air minum)							
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Penyehatan Dasar)							
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Sanitasi)							
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe							
Program									
Kegiatan 1.Fasilitasi penyusunan dan implementasi regulasi dan kebijakan tentang PDRD	Rekomendasi teknis rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang PDRD	Laporan	1	1	2,760,000,000		Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	Rekomendasi teknis desain peningkatan PAD	Laporan	1	1					
INDIKATOR SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana							
Program									
Kegiatan									



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP: \$ 1,9 per hari)							
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
INDIKATOR SDGs	1.3.1.(b)								
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	1.4.1*								
	1.4.2*								
Kegiatan 2: Fasilitasi penguatan kapasitas terkait PDRD	ASN Pemerintah daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam pengelolaan PDRD								
Kegiatan 3: Fasilitasi penguatan kapasitas terkait DAU	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan mengelola Dana Alokasi Umum								
	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih membuat perencanaan pemenuhan belanja wajib infrastruktur di daerah								
Kegiatan 4; Fasilitasi penguatan kapasitas terkait	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Dana Alokasi Khusus	mengelola Dana Alokasi Khusus								
Kegiatan 5: Fasilitasi pemanfaatan hasil kajian belanja daerah untuk optimalisasi TKD	Rekomendasi teknis distribusi alokasi anggaran TKD untuk pembiayaan penerapan dan pemenuhan SPM dan isu-isu strategis pembangunan lainnya								
	Rekomendasi teknis untuk penyusunan laporan kajian belanja tahunan Pengeluaran dan Pendapatan Keuangan Publik (PERA)								
Kegiatan 6; Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang kelembagaan tata kelola data penerapan dan pemenuhan SPM	Rekomendasi teknis penyusunan kebijakan daerah tentang kelembagaan tata kelola data penerapan dan pemenuhan SPM								
Kegiatan 7; Fasilitasi penguatan kapasitas dan penyusunan rencana aksi penerapan SPM	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih penyusunan rencana aksi penerapan SPM (termasuk tahapan penerapan SPM, indikator mutu SPM, costing SPM, dll.)								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	Rekomendasi teknis tentang rencana aksi penerapan SPM								
Kegiatan 8; Fasilitasi perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM	Rekomendasi teknis komponen belanja dan unit cost perhitungan kebutuhan penerapan SPM, sesuai standar satuan harga daerah								
Kegiatan 9; Fasilitasi penguatan kapasitas terkait perencanaan daerah termasuk pengintegrasian berbagai rencana aksi tematik	ASN Pemprov pada unit kerja yang relevan terlatih dalam menyusun perencanaan, termasuk pemanfaatan cascade nomenklatur rumusan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan								
Kegiatan 9; Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah	Hasil analisis pemetaan tantangan dan isu-isu strategis pembangunan daerah terkait penyediaan layanan dasar								
	Input teknis rancangan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif								
	Input teknis rancangan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	Input teknis rancangan dokumen RKPD yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif								
Kegiatan 10; Fasilitasi penguatan kapasitas terkait penganggaran daerah	ASN Pemprov pada unit kerja yang relevan terlatih dalam penyusunan penganggaran, termasuk penyusunan KUA PPAS yang selaras dengan KEM PPKF Regional dan pemanfaatan SIPD-RI dalam penganggaran								
Kegiatan 11; Fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran daerah	Rekomendasi teknis untuk KUA PPAS yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar								
	Rekomendasi teknis perhitungan kebutuhan pembiayaan penerapan dan pemenuhan layanan dasar, kebutuhan disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya								
Kegiatan 12; Fasilitasi penguatan kelembagaan pengelola satu data daerah	Rekomendasi teknis penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Satu Data Daerah								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	Rekomendasi teknis tentang pedoman tata kelola forum satu data daerah								
Kegiatan 13; Fasilitasi penguatan kapasitas pengelola satu data daerah	ASN Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota pada unit kerja yang relevan terlatih untuk pengelolaan satu data								
Kegiatan 14; Fasilitasi identifikasi dan pemutakhiran sistem informasi tingkat desa milik daerah yang memuat variabel data REGSOSEK	Rekomendasi teknis tentang kerangka pengembangan Sistem Informasi di tingkat desa yang memuat variabel data REGSOSEK								
	Input teknis pemutakhiran sistem informasi di tingkat desa yang sudah ada								
Kegiatan 15; Fasilitasi penguatan dan integrasi sistem pengelolaan data tingkat daerah dan pusat	Rekomendasi teknis tentang skema integrasi aplikasi daerah dengan aplikasi SEPAKAT								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Kegiatan 16: Fasilitasi penguatan kapasitas penggunaan dan pemanfaatan SIPD-RI	Terlatihnya pelatih aplikasi SIPD RI di tingkat provinsi								
	Fasilitasi teknis pengembangan mekanisme pendampingan Pemprov/Pemda dalam penggunaan SIPD-RI								
Kegiatan 17; Fasilitasi pengembangan kerangka analisis data mikro, makro, dan sektor untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah	Input pengembangan mekanisme dan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan portal satu data termasuk bagi pakai data sesuai kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan dasar bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan								
Kegiatan 18: Fasilitasi penguatan kapasitas terkait analisis data mikro terpilih untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah	Fasilitasi teknis Tim Pelatih SEPAKAT Provinsi dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Kab/Kota untuk memanfaatkan data REGSOSEK dalam perencanaan daerah								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	Tersedianya Tim Pelatih di Provinsi untuk pelatihan pemanfaatan data REGSOSEK melalui SEPAKAT								
	Rekomendasi teknis tentang daftar data pembangunan prioritas untuk penyusunan perencanaan daerah, termasuk data terkait pemenuhan SPM								
	Rekomendasi teknis tentang daftar data prioritas untuk penerapan SPM								
	Rekomendasi teknis tentang pemanfaatan hasil analisis SEPAKAT untuk perencanaan daerah								
Kegiatan 19; Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penerapan SPM	Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan penerapan SPM kepada pimpinan daerah								
Kegiatan 20: Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan	Fasilitasi teknis penyampaian regulasi, penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif termasuk kebijakan terkait KEM PPKF Regional kepada pimpinan daerah dan								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
layanan dasar yang inklusif	TAPD								
Kegiatan 21; Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan PDRD	Fasilitasi teknis pengembangan pedoman dan panduan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan PDRD ke Kab/Kota								
	Fasilitasi teknis sinergitas pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota								
Kegiatan 22: Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan TKD	Fasilitasi teknis penyampaian perkembangan tentang kebijakan-kebijakan TKD, capaian, dan kendala pengelolaan TKD kepada pimpinan daerah								
Kegiatan 23; Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan	Fasilitasi teknis penyampaian isu-isu terkait kebutuhan kelompok rentan, manfaat, dan kebijakan terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah kepada pimpinan daerah								
<hr/>									
Kegiatan 1; Fasilitasi penyusunan	Rekomendasi teknis penyusunan peraturan daerah tentang rencana								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
regulasi, kebijakan, dan rencana aksi pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan	aksi pengarusutamaan gender								
	Input teknis penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas								
	Rekomendasi teknis penyusunan peraturan kepala daerah tentang kelanjutusiaan								
	ASN Pemprov dari unit kerja yang relevan terlatih dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif GEDSI								
Kegiatan 2; Penguatan platform kolaborasi pemda dan jaringan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan yang inklusif	Rekomendasi teknis penyusunan kebijakan daerah tentang pelembagaan model kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk melalui forum perencanaan inklusi atau forum-forum tematik								
	Fasilitasi teknis penyelenggaraan model kolaborasi lintas								

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	pemangku kepentingan, termasuk melakukan pembentukan/revitalisasi forum perencanaan inklusi atau forum-forum tematik lainnya								
Kegiatan 3; Fasilitasi penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam pemanfaatan hasil analisis kebutuhan kelompok rentan	Jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas terlatih dalam mengakses dan menganalisis data terkait kebutuhan kelompok rentan								
Kegiatan 4: Fasilitasi penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam advokasi kebutuhan kelompok rentan dan kolaborasi	Tersedianya jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI								
Kegiatan 5; Fasilitasi kolaborasi pemda dengan Perguruan Tinggi dan CSO untuk perluasan sistem informasi tingkat desa	Rekomendasi teknis model kolaborasi pemerintah daerah dengan universitas dan organisasi masyarakat sipil untuk perluasan dan pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa								



LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT (SKALA) DI PROVINSI NTB TAHUN 2024									
Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Kegiatan 6; Fasilitasi penguatan kapasitas individu dan kelembagaan daerah pengelola sistem informasi tingkat desa	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam teknis pembinaan sistem informasi di tingkat desa								
Kegiatan 6; Dukungan tata kelola program di Provinsi NTB	Pengelolaan Sekretariat SKALA di Provinsi NTB								
INDIKATOR SDGs	1.5.1*								
	1.5.4*								
Program									
Kegiatan									

Tujuan 2.Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)							
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan							
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.000 Kkal/Kapita/Hari							
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari							
	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)							
Program									
Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
INDIKATOR SDGs	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan)								
Program										
Kegiatan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II							
INDIKATOR SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)													
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan													
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.000 Kkal/Kapita/Hari													
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari													
	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe													
Program															
Kegiatan															
INDIKATOR SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita													
PROGRAM 1. PARENTS (PENINGKATAN KAPASITAS KADER UNTUK PENCEGAHAN STUNTING)															
Kegiatan Melaksanakan BCC (Behavior Change Communication)	Memperkuat partisipasi orang tua dalam pencegahan stunting	Kab/Kota	2023-2026						Pemerintah Australia	Pulau Lombok	Plan & BKKBN				
Menyusun modul advokasi 1000 HPK															
PROGRAM GEMA CITA (GENERASI EMAS BANGSA BEBAS PERKAWINAN USIA ANAK)															
Kegiatan; Intervensi langsung dan	Menguatkan kapasitas dari agensi remaja untuk								Lobar	Plan					



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Menguatkan mekanisme perlindungan anak melalui Sekolah Ramah Anak	mencegah perkawinan anak dan kehamilan remaja									
	Terbentuknya sahabat pengadilan									
INDIKATOR SDGs	2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan)								
Program										
Kegiatan										

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
INDIKATOR SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria								
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang								
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta								
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.								
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi								
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)								
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)								
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.								
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK								
		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT								
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan							
		Percentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang: (a) PAUD/Sederajat; (b) SD/Sederajat; (c) SMP/Sederajat; dan (d) SMA/Sederajat							
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).							
		Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
		Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
Program									
Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	4.6.1.(a)	Percentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun							
Program									
Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II					
INDIKATOR SDGs	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang: (a) PAUD/Sederajat; (b) SD/Sederajat; (c) SMP/Sederajat; dan (d) SMA/Sederajat								
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
		Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)								



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
		Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)								
Program Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas								
PROGRAM 1: PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR PADA SISWA SD/MI (CURRICULUM AND ASSESSMENT)										
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam melakukan identifikasi dan penyediaan bahan pendukung implementasi KM jenjang SD/MI khususnya untuk kecakapan dasar	Meningkatnya kemampuan ekosistem 5 kabupaten mitra dalam mengidentifikasi masalah dan solusi untuk implementasi Kurikulum Nasional untuk kecakapan dasar	Kabupaten /Kota	2024-2025			1,311,050,000			Pemerintah Australia	5 Kab/Kota
Kegiatan 2: Mendukung aktor dalam ekosistem kabupaten Lombok Timur untuk menguatkan ULD Kabupaten dalam melakukan identifikasi dan pengembangan alat/bahan pendukung implementasi asesmen diagnostic dan formatif literasi yang adaptif oleh guru bagi siswa dengan ragam kesulitan fungsional belajar	Meningkatnya pemahaman aktor dalam ekosistem Kabupaten Lombok Timur tentang peran ULD								Kabupaten Lombok Timur	
	Meningkatnya kemampuan ekosistem dalam mendukung ULD Kabupaten untuk									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	identifikasi dan pengembangan alat/bahan pendukung implementasi asesmen literasi yang adaptif oleh guru bagi siswa dengan ragam kesulitan fungsional										
PROGRAM 2: TEACHING PRACTICES											
Kegiatan 1: Mendukung Asosiasi LPTK NTB dalam penguatan kapasitas dosen PGSD/PGMI untuk meningkatkan mutu pembelajaran numerasi bagi mahasiswa calon guru, dan guru SD/MI.	Asosiasi LPTK NTB memiliki kemampuan untuk memfasilitasi proses penguatan dosen PGSD/PGMI untuk meningkatkan mutu pembelajaran numerasi bagi mahasiswa calon guru, dan guru SD/MI									Provinsi NTB	
Kegiatan 2: Mendukung ekosistem 2 kabupaten mitra untuk menemukan cara yang dapat mengaktifkan komunitas belajar guru tingkat SD/MI dalam meningkatkan kemampuan kecakapan dasar yang inklusif dengan menggunakan materi-materi yang sudah dikembangkan dengan dukungan INOVASI	Menguatnya ekosistem 2 kabupaten untuk mengaktifkan komunitas belajar guru tingkat SD/MI dan menggunakan materi-materi yang sudah dikembangkan dengan dukungan INOVASI								2 Kabupaten		
PROGRAM 3: EDUCATIONAL LEADERSHIP											
Kegiatan; 1 Mendukung aktor-aktor	Menguatnya kapasitas aktor dalam ekosistem								Kabupaten Lombok		



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
ekosistem kabupaten Lombok Timur untuk menemukan pola kepemimpinan MI yang secara efektif dapat menguatkan iklim madrasah dan mendukung pencegahan perkawinan anak (dalam bingkai SKC- GEDSICC) fokus pada iklim madrasah),	Kabupaten Lombok Timur untuk menemukan pola kepemimpinan MI yang secara efektif dapat menguatkan iklim madrasah dan mendukung pencegahan perkawinan anak								Timur	
PROGRAM 4: GENDER EQUALITY										
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam ekosistem di 5 kabupaten mitra menemukan cara yang relevan dan efektif dalam mengurangi kesenjangan capaian belajar kecakapan dasar siswa laki-laki dengan siswa perempuan	Aktor-aktor lokal memahami faktor-faktor penyebab kesenjangan capaian pembelajaran anak laki-laki dan perempuan.								5 Kabupaten	
	Aktor-aktor lokal menentukan dan menerapkan solusi prioritas penanganan masalah kesenjangan capaian pembelajaran anak laki-laki dan Perempuan									
PROGRAM 5: CLIMATE CHANGE										
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam ekosistem	Meningkatnya kemampuan aktor								1 Kabupaten	



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
setidaknya 1 kabupaten mitra untuk menemukan cara-cara yang relevan dan efektif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam pembelajaran	dalam ekosistem di setidaknya 1 kabupaten mitra untuk menemukan cara-cara yang relevan dan efektif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam pembelajaran									
PROGRAM 6: DISABILITY ACTIVITIES										
Kegiatan 1: Mendukung kolaborasi aktor di 3 kabupaten termasuk dinas, bappeda, kemenag, ULD, LPTK dengan KNTBM dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan orang dewasa dan anak-anak terhadap isu-isu disabilitas melalui bahan bacaan yang relevan dan berkualitas	Meningkatnya kolaborasi aktor yang relevan dalam ekosistem dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan orang dewasa dan anak-anak terhadap isu-isu disabilitas melalui bahan bacaan yang relevan dan berkualitas								3 Kabupaten	
INDIKATOR SDGs	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun								
Program										
Kegiatan										

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota							
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah: DPRD							
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (a) kelompok WUS							
		Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (b) kelompok PUS							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 5 tahun							
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 0 tahun							
Program									



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Kegiatan									

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	6.1.1*	Percentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak)							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	6.2.1.(a)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak							
	6.2.1*	(b) Percentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)							
Program									
Kegiatan									



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR SDGs	6.1.1*	Percentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak)									
Program											
Kegiatan											
INDIKATOR SDGs	6.2.1.(a)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak									
	6.2.1*	(b) Percentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air									
Program											
Kegiatan STBM Inklusi	memperkuat sanitasi masyarakat yang layak menuju aman	Kabupaten	2024-2025			780.000.000,			WVI (wahana Visi Indonesia)	Lombok Timur dan Lombok Utara	Mitra Samya
Program	WINNER (Women, Disability inclusive and nutrion sensitive wash										
Kegiatan: Mengadakan kegiatan bertajuk "kolaborasi kaum muda dalam promosi STBM-MKM	Membangun sinergi positif kaum muda dalam mengatasi persoalan STBM-MKM										Plan
Kegiatan: Mendampingi pengusaha sedot tinja swasta menuju sanitasi aman	Meningkatkan kesadaran pengusaha sedot tinja, pencegahan pencemaran, dan menciptakan lingkungan yang sehat.		2022-2024						Kota mataram, loteng		Plan, Transform

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Advokasi dokumen roadmap pencegahan stunting	Terbentuknya dokumen sebagai pedoman bagi desa dan kelurahan dalam pencegahan stunting	Desa/Kelurahan	2024							Kota mataram, loteng	
Program Water For Women Climate Resilience Inclusive Water and Sanitation Higgiene											
Kegiatan Memperkuat sistem di pemerintahan dan masyarakat mewujudkan sanitasi inklusif	Meningkatnya kualitas perilaku hidup bersih dan sehat								DFAT	Kabupaten Sumbawa	Plan
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurangi risiko terkait air dan sanitasi	Meningkatnya akses sarana air bersih dan sanitasi yang inklusif										
Mendorong kaum rentan sebagai penggerak perubahan dalam ketahanan iklim	Terbentuknya forum PSDAT										
	Terbentuknya sekolah hijau										
Program Jelajah Timur (Aksi solidaritas memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan											
Kegiatan melaksanakan kegiatan charity lari marathon	Terkompulnya charity untuk pengadaan akses air bersih		2024			3,863.150.000			charity	Loteng dan Lotim	Plan
INDIKATOR SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)									



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)								
Program										
Kegiatan										

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	7.1.1*	Rasio Elektifikasi							
	7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga							
Program									
Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II							
INDIKATOR SDGs	7.1.1*	Rasio Elektifikasi													
	7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita													
Program															
Kegiatan															
INDIKATOR SDGs	7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga													
Program															
Kegiatan	TOT inklusi disabilitas	Desa	2024						DFAT-OXFAM Penabulu	Tetebatu Selatan, Rarang, Dasan Geria, Taman Ayu, Lantan,	Gema Alam				

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
and Just Energy Transition in Indonesia (WE for JET)										dan Pandan Indah	
	Pendataan penyandang disabilitas										
	Kajian pemetaan partisipatif berbasis potensi energi terbarukan lokal desa										
	Kajian Rapid Care Analisis dalam transisi energi										
	Sekolah SETARA										
	Gender untuk laki-laki										
	Pemetaan energi terbarukan lokal di Desa Pandan Indah dan Desa Lantan										
	Survei dengan tim Ahli untuk pembangunan ET di Desa										
	Pendampingan (meningkatkan										



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	pemahaman kepada perempuan sekolah setara tentang transisi energi, kebutuhan perempuan dll										
	Jurnalisme warga										
	Literasi energi terbarukan										
Program : Empower											
Kegiatan: Pendampingan dan pelatihan	Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Perubahan Iklim di NTT, NTB, dan Aceh	Desa	2024						WRI_UN Women	Tetebaru Selatan, Rarang, Dasan Geria, Taman Ayu, Lantan, dan Pandan Indah	Gema Alam

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	8.1.1.[a]	PDRB per kapita							
	8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	8.3.1*	Proporsi kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja							
	8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran							
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	8.6.1*	Percentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)							



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	8.7.1.(a)	Percentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja								
Program										
Kegiatan										
INDIKATOR SDGs	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB.								
	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.								
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara								
Program										
Kegiatan										

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi							
	9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Bongkar)							
		Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Muat)							
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara							
	9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan penyeberangan							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	9.2.1*	Rasio PDRB industry pengolahan dan nilai tambah industry pengolahan per kapita							
	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan							
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industry pengolahan							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	10.1.1*	Koefisien Gini							
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal							
	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	11.6.1.(a)	Presentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya							
	11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah							
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n	Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun							
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)							
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup							
Program									
Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR SDGs	13.1.3*	Percentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana									
Program											
Kegiatan											
INDIKATOR SDGs	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun									
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)									
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)									
Program	FOMA-PRO Fostering Multistakeholder Alliance for Pro-Poor and Gender Sensitive Low Carbon Development and Climate Resilience;										
Kegiatan: Keuangan mikro syariah untuk Ekonomi Sirkuler	Memberdayakan ekonomi masyarakat, mengurangi jumlah sampah yang dibuang, menciptakan produk bernilai tambah, meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah dan perilaku ramah lingkungan.		2022-2024			4.832.250.000				Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara	YRII
Microfinance Syariah for Wanatani	meningkatkan produktivitas lahan, konservasi hayati, kesadaran akan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan										
Program	BUDLOC (Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience										
Praktik Pelatihan praktis POH	Meningkatkan kesejahteraan	Kabupaten/Kota	2022-2025			23.630.000.000				Kab.Bima, kab.Dompu, Kota Bima	YRII
Bantuan bibit untuk komunitas	Berkurangnya konflik hutan dan lahan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
wanatani											
Pembuatan demplot agroforestri	Kesetaraan laki-laki dan Perempuan										
Pendampingan penyusunan dokumen PRKBI											
Program	Scaling-up graduation and resilience in asia)										
Kegiatan; Pelatihan dan kajian risiko bencana iklim	Meningkatkan mata pencitrahan yang tangguh, asset, dan pengembangan sosial	Desa	2024-2026			13.940.000.000				Perigi, suntalangu, puncak jeringo, mekarsari, selaparang	YRII
Penyusunan dokumen risiko iklim	Memperkuat ketahanan keluarga menghadapi bencana dampak perubahan iklim										
Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim	Memperkuat sistem dan kapasitas Lembaga dan pemangku kepentingan dalam ketahanan bencana dan meningkatkan mekanisme adaptasi.										
Pembentukan dan pelatihan tim siaga bencana komunitas dan daerah	Memperkuat kapasitas di Tingkat regional dan global untuk berbagi inovasi dalam mengurangi kemiskinan, dan ketangguhan bencana.										



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun n		Alokasi Anggaran Tahun n	Realisasi Anggaran Tahun n (Juta Rp)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR SDGs	13.3.1.(a)										
Program Kegiatan											

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	14.6.1.(a)	Percentase kepatuhan pelaku usaha.							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir							
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).							
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)							
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi							
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan							
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan							
Program									
Kegiatan									



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun n	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah							
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun							
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur							
Program									
Kegiatan									

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
INDIKATOR SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB							
	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya							
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB							
Program									
Kegiatan									
INDIKATOR SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.							
Program									
Kegiatan									